

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

2025-2029

PENGANTAR

Alhamdulillah, pada kesempatan ini perkenalkan kepada Allah SWT atas tersusunnya Dokumen Rencana Dasar Kebijakan Pangan Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2028. Rencana ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna.

Rencana ini disusun dengan memperhatikan permasalahan di daerah, kondisi strategi pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan perolehan dari RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2028 yang mengkomodifikasi program dan kegiatan untuk mendukung program kegiatan Kementerian pangan. Rencana ini merupakan komitmen Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu perencanaan kebijakan pengelolaan permasalahan strategis urusan pangan dan pertanian. Rencana Strategi ini di monev indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang mengarah pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025 - 2028.

Mania saya dalam Dokumen Rencana ini sudah dapat diwujudkan sebagai sebuah plan, karena itu ini cara dan cara untuk pertukaran akan kami lakukan dengan terbuka. Akhirnya sangat sebagai keterbatasan yang ada, kami berharap Rencana ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pembangunan di bidang ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Natuna.

Rantti, 8 September 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Natuna



WIS WISJALL, S.H.
007 199807 200311 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Mula	4
1.3 Misioner dan Tujuan	8
1.4 Sistem Organisasi	9
II. PEMERIKSAAN PELAYANAN, PENGALAMAN DAN SUDU STRATEGIS PEMANGKAT DAERAH	11
2.1 Gambaran Pelayanan Pemangkat Daerah	11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pemangkat Daerah	11
2.1.2 Maksud Maksud Maksud Maksud	13
2.1.3 Sumber Daya Pemangkat Daerah	24
2.1.4 Kinerja Pelayanan Pemangkat Daerah	29
2.1.5 Kelengkapan Dokumen Laporan	45
2.2 PEMERIKSAAN DAN SUDU STRATEGIS PEMANGKAT DAERAH	66
2.2.1 Pemertahanan Pemangkat Daerah	67
2.2.2 SUDU STRATEGIS Pemangkat Daerah	40
III. TUJUAN, KEMAMPUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBERKEMBANGAN	69
3.1 Tujuan	69
3.2 Sasaran	70
3.3 Strategi	71
3.4 arah kebijakan	80
IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KISERJA PENYELENGGARAAN	94
4.1 Program	94
4.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan	91

IV. KLASA POCZYNIATEK	101
V. ZEMSTUP	102

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1.3.1.1 : Jumlah PHS Dinas Kesehatan Penges dan Partisipasi Masyarakat Penges / Geografi di Tahun 2024
- Tabel 2.1.3.1.2 : Jumlah PHS/CPHS/PVVK Dinas Kesehatan Penges dan Partisipasi Masyarakat Pendidikan Tahun 2023
- Tabel 2.1.3.1.3 : Daftar sarana dan prasarana Pemasokan Obat Kesehatan Penges dan Partisipasi Sektor Nonswast 2023
- Tabel 2.1.3.1.4 : Jumlah Alat dan Mesin Dinas Kesehatan Penges dan Partisipasi s/ 8 Tahun 2023
- Tabel 2.1.4.1 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Penges dan Partisipasi Kabupaten Negeri tahun 2021-2024
- Tabel 2.1.4.2 : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 - 2024
- Tabel 2.1.4.3 : Keterwakilan jengam UMSK tahun 2022 - 2024
- Tabel 2.1.4.4 : Produk Tanaman Penges (Padi) Tahun 2023 - 2024
- Tabel 2.1.4.5 : Produk Tanaman Penges (Tea) Tahun 2023 - 2024
- Tabel 2.1.4.6 : Produk Mikrokultur (Tea) Tahun 2023 - 2024
- Tabel 2.1.4.7 : Produk Tanaman Perikanan (Yak) Tahun 2023 - 2024
- Tabel 2.1.4.8 : Produk Daging dan Telur (Tern) Tahun 2023 - 2024
- Tabel 2.1.4.9 : Realisasi capaian indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Penges dan Partisipasi tahun 2022-2024
- Tabel 2.1.4.10 : Realisasi Anggaran Kinerja Dana APBD Kabupaten Negeri Tahun 2023-2024
- Tabel 2.1.4.11 : Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Negeri Tahun 2023-2024
- Tabel 2.2.2.1 : IIS Strategi Persepektif Daerah
- Tabel 2.2.1 : Tujuan dan Sasaran Rencana Dinas Kesehatan Penges dan Partisipasi Kabupaten Negeri Tahun 2023-2029
- Tabel 2.2.2 : Pemasangan, Keaktifan, dan KAP/MD Kabupaten Negeri 2024 - 2030 terkait urusan Penges dan Partisipasi

Table 4.1	: Arah dan/atau Penawaran Kegiatan sesuai Bertujuan RPJMD tahun 2005 - 2009
Table 4.1.1	: Capaian Indikator Kinerja Utama Peningkatan Kemampuan Manusia Tahun 2005-2009
Table 4.1.2	: Perkembangan Rata-Rata Kemiskinan energi dan protein Kabupaten Natuna Tahun 2005 - 2009
Table 4.1.3	: Data Cadangan Pangan Pokok/utama Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2009
Table 4.1.4	: LRA Lahan Basah Mekar/utama dan Basah Kabupaten Natuna Tahun 2005, 2006, 2007
Table 4.1.5	: Produk Tanaman Pangan Tahun 2001 - 2004
Table 4.1.6	: LRA Terasa, Padi dan Padi Terasa Padi (M) Tahun 2001-2004
Table 4.1.7	: Fisik/teknik hasil tahun 2000-2004
Table 4.1.8	: Produk Tembakau Tahun 2000-2004
Table 4.1.9	: Penanaman Terasa Tahun 2000-2004
Table 4.1.10	: Peningkatan Manusia (Cukup) Tahun 2000-2004
Table 4.1.11	: Peningkatan Kesehatan Manusia / Terasa (Kurang) Tahun 2000- 2004
Table 4.1.12	: Peningkatan Peningkatan Acid Herba Tahun 2000-2004
Table 4.1.13	: Produk Tanaman Perikanan (Terasa) Tahun 2000-2004
Table 4.2.1	: Teknik perencanaan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Berkaitan PD
Table 4.2.2	: Daftar Sub Kegiatan Perencanaan Dalam Mendukung Program Peningkatan Peningkatan Daerah
Table 4.2.3	: indikator kinerja utama PD
Table 4.2.4	: Operasional dan Formulasi Perhitungan JCU PD
Table 4.2.5	: Teknik Merencanakan Tujuan dan Sasaran Sasaran PD
Table 4.2.6	: Rencana Program dan Kegiatan yang Diikuti Kebutuhan Peningkatan Tidak Merupakan Program dan Perencanaan Tahun 2000-2009

DAFTAR ISI

- Daftar I : Bagian Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Penges dan Pemasok
- Daftar 2 : Petunjuk Pegawai Dinas Kesehatan Penges dan Petunjuk Berbasis Pendidikan
- Daftar 3 : Petunjuk Pegawai Dinas Kesehatan Penges dan Petunjuk Petunjuk Kerja Kesehatan
- Daftar 4 : Struktur Dinas Kesehatan Penges dan Petunjuk tahun 2000 - 2000
- Daftar 5 : Struktur Dinas Kesehatan Penges dan Petunjuk Tahun 2000 - 2000



1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Rencana Strategi Dinas Kereahan Pangan dan Pertanian dan Pertanian Kabupaten Natuna merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar mampu mencapai sasaran perkembangan lingkungan strategis skala lokal, nasional, dan global dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna tahun 2020-2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi utama kerja. Sesuai dengan hal tersebut, penyusunan Rencana Dinas Kereahan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna akan menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan di Kabupaten Natuna untuk lima tahun mendatang. Selain itu, rencana Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna tahun 2020 - 2025 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan dan peningkatan produksi pertanian. Peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan produksi pertanian dilaksanakan secara terpadu upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.





perwujudan pembangunan sains, budaya dan teknologi sebagai pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan dilaksanakan melalui upaya peningkatan kualitas dengan pemerataan distribusi pangan, peningkatan kesehatan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan dan pengembangan sistem/proses/prosedur, peningkatan produktivitas, serta penguatan IPT sebagai fungsi utama, program pembangunan kesehatan pangan dan pertanian terpadu direvitalisasi untuk mendukung terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mandiri dan terdiversifikasi dengan pangan berkualitas diandalkan guna pembangunan sektor agribisnis dan pengentasan kemiskinan ekstrem yang berbasis sektor riil dengan investasi yang kondusif.

Dalam rangka mendukung dan memantapkan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian, UU ditandatangani Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Pertanian Kabupaten Betawa sebagai salah satu dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Betawa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Betawa Nomor 16 tahun 2021, menjadi kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan, serta sejalan dengan fungsinya untuk melaksanakan pengabdian, pemantauan dan evaluasi serta koordinasi di tingkat kabupaten pangan dan pertanian, bersama-sama instansi terkait lainnya dalam memantapkan ketahanan pangan.

Peraturan rencana strategis Perangkat Daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah dilaksanakan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, serta melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Selain itu tercerminkan dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2040, UU ini menetapkan arah pembangunan





rezonansi untuk periode 20 tahun ke depan, menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan. Perencanaan pembangunan nasional tahun 2016 merupakan pembangunan yang berbasis sains, teknologi dan inovasi/keunggulan dan Perencanaan Daerah tahun 2016 dengan kewenangannya.

Sejak tahun, proses perancangan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Nagasari sebagai pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017 pada Lampiran tentang Tata Cara Penyusunan dan Pembinaan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Dokumen Rencana Anggaran Daerah Daerah provinsi ini tidak terpisahkan dan dilakukan bersama-sama dengan tahap penyusunan dokumen RPJMD. Pada hal, ada juga terdapatnya UU 2 Tahun 2015 yang mewajibkan pembuatan penyusunan RPJMD dan Rencana KD (Perangkat Daerah) untuk periode 2016-2019. Sehingga akan terdapat yang dibuat dalam rencana ini yakni dengan RPJMD Kabupaten Nagasari tahun 2016-2019.

Sejak terdapatnya pada Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2017, secara substantif rencana ini sebagai acuan kebijakan RPJMD Kabupaten Nagasari 2016 - 2019, Rencana Dasar Kabupaten Nagasari, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Rencana Tahun Kabupaten Nagasari Kementerian Pertanian RI, serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tercapainya dan konsolidasi antara dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan] antara berbagai level pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Dasar Kabupaten Nagasari dan Peraturan tahun 2016-2019 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan publik yang akuntabel, robust dan implementasi.





2. Dasar Hukum

Peraturan Menteri dan Menteri (Menteri) dalam kerangka tugas dan perintah Kabupaten Teratai Tahun 2020-2029 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Palawan, Kabupaten Mera, Kabupaten Molen Mili, Kabupaten KKA, Kabupaten Kertaja, Kabupaten HUKA, Kabupaten Kusanu Wingingi, dan Kota Mera (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah (dianulir beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kotaja dan Undang-Undang Nomor 64 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palawan, Kabupaten Mera Mili, Kabupaten Molen Mili, Kabupaten Kertaja, Kabupaten HUKA, Kabupaten Kusanu Wingingi dan Kota Mera (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Kecamatan (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Peraturan Ruang Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 4734) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 4506);





Denda Di Daerah (Surat Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 327);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang PASTORISASI POKOK MUJUK DAERAH (Surat Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2054) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang PASTORISASI POKOK MUJUK DAERAH (Surat Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara PENGEMBANGAN, PENGUSAHAAN DAN EVALUASI PANGKASAN DAERAH, Tata Cara EVALUASI KEMUNDURAN PETAJARA DAERAH Tertang KAWASAN PANGKASAN JANGKA PENJANG DAERAH dan KAWASAN PANGKASAN JANGKA MENENGAH DAERAH, serta Tata Cara FORMULASI KAWASAN PANGKASAN JANGKA PENJANG DAERAH, KAWASAN PANGKASAN JANGKA MENENGAH DAERAH, dan KAWASAN SURJE PANGKASAN DAERAH (Surat Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3332);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Surat Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 588);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Surat Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1419);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Peningkat Daerah Tahun 2002-2007;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2045 (Lambiran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2004 Nomor 67);





29. Peraturan Perintah (PP) no 17 Tahun 2015 tentang Kelayakan Pengerusi Dewan Guru;
30. Peraturan Perundangan no 47 Tahun 2014 tentang Pengurusan dan perunggahan pejabat kakitangan;
31. Peraturan Majlis Mesyuarat MUDA 1 Tahun 2015 tentang Senarai Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektori Daerah dan Badan Kabupaten MUDA.

3. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan Mekanisme Strategi Dana Kelayakan Pengerusi dan Penerimaan Kabupaten MUDA tahun 2018-2019 dilaksanakan sebagai pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten MUDA tahun 2018-2019 dan sebagai dasar bagi semua (struktur dan budaya) aparat Dana Kelayakan Pengerusi dan Perwakilan Kabupaten MUDA dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan Pemerintahan Kabupaten MUDA.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Komite Eksekutif Kelayakan Pengerusi dan Penerimaan MUDA ini adalah:

1. Meningkatkan operasional mekanisme Dana Kelayakan Pengerusi dan penerimaan Kabupaten MUDA;
2. Menjadi instrumen alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi program dan kegiatan;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Rakor) Organisasi Perangkat Daerah setiap tahun;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan;
5. Meningkatkan energi dan sinergisitas;





4. Sistematisasi Perencanaan

Berdasarkan surat edaran Bupati Natuna nomor 122 tahun 2022 tentang penyusunan kerangka acuan strategi Perangkat Daerah (Rencana PD) tahun 2025 - 2029. Maka ini disusun oleh KEMUKAAN PRAGATI DAN PERENCANAAN Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2029 sebagai acuan sistematisasi sebagai berikut:

MAM I. PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas tentang misi kabupaten, indikator kinerja, sasaran dan tujuan serta sistematika penyusunan.

MAM II. DESKRIPSI PERNYAIAN PERENCANAAN DAN ROL STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Melihat gambaran pelayanan perangkat daerah (misi) tentang tugas, fungsi, struktur perangkat daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, serta perangkat daerah serta hasil identifikasi tantangan permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, termasuk visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan penentuan isi strategi.

MAM III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kabupaten Pragati dan Perencanaan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, serta menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mencapainya tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kabupaten Pragati dan Perencanaan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

MAM IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Melihat tentang program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas KEMUKAAN PRAGATI DAN PERENCANAAN Kabupaten Natuna Tahun



2020-2025 yang diturunkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan arahan pemerintahan dan isu strategis, serta menunjukkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Pango dan Partisipasi Masyarakat Utama sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pango Tahun 2020-2025

5.18.11 Penutup

Berikut capaian dan pagugasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Misi: Kesehatan Pango dan Partisipasi Masyarakat Utama Tahun 2020-2025 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelaksanaan pertanggungjawaban secara rutin/terencana dan sistematis.





GAMBARAN PELAYANAN, PEMANAJANAN DAN ISI STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Menyebutkan program, partisipasi dan isu strategi perangkat daerah untuk memberikan layanan dan hal. Untuk gambaran pelayanan yang memberikan target. Isu dan struktur Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, menunjukkan secara ringkas apa saja konsep daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, menguraikan capaian-capaian kinerja yang telah diraih dan untuk pelaksanaan fungsi strategis, serta menguraikan struktur layanan perangkat daerah. Serta juga gambaran partisipasi dan isu strategi perangkat daerah yang memberikan pelaksanaan layanan dan prosedur isu-isu strategi.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana kebijakan daerah di bidang Pangan dan Pertanian, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pemerintahan di bidang Pangan dan Pertanian berdasarkan arah strategis dan tugas pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Dinas Kesehatan pangan dan pertanian mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian, dengan rincian sebagai berikut :



1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanaman lahan tebu dan tebuan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Perkebunan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Bidang Perikanan, Sarana dan Peralatan.
3. Merumuskan kebijakan pelaksanaan program dan anggaran.
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Perkebunan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Bidang Perikanan, Sarana dan Peralatan.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi keuangan, urusan dan ketatausahaan.
6. Menetapkan penyelenggaraan administrasi keuangan, urusan dan ketatausahaan.
7. Menitipkan dan mengawasi tindakan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup daerah.
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Kabupaten Bangga dan Para Kepala dan Para Staf Kabupaten Bangga mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kebijakan tebu di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Perkebunan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Perikanan dan Kesehatan Hewan serta Bidang Perikanan, Sarana dan Peralatan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Perkebunan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Perikanan dan Kesehatan Hewan serta Bidang Perikanan, Sarana dan Peralatan.





3. Pelaksanaan pengabdian, pemertaman dan evaluasi kegiatan di Bidang Kefahaman Penguasaan Bidang Perkebunan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Perikanan dan Kelautan sesuai serta Bidang Perikanan, Sastra dan Pariwisata.
4. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan dan penyelenggaraan administratif lainnya dan keterkaitannya;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Dinas Kesehatan jenjang dan pelayanan Kesehatan ITIKAS, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Paksi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

Kerangka tugas, wewenang, uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Penguasaan dan Perikanan Kabupaten Karawang:





Kelembagaan
 Struktur organisasi yang berkaitan dengan cara kerja dan
 bentuk pelaksanaan fungsi dan tugas organisasi
 secara sistematis





Urutan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Kabupaten Merauke terdiri dari :

2.1.2.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang Kesehatan Pangan dan Pertanian.

Tugas Pokok Kepala Dinas meliputi :

- Menganalisis dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan langkay tugasnya meliputi Kesehatan, Bidang Kesehatan Pangan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perikanan, Sarana dan Prasarana.
- Mengarahkan dan mengkoordinasikan tugas kepala bawahan agar sesuai dengan tugasnya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
- Menganalisis dan menetapkan kebijakan perencanaan dan anggaran di Segway Dinas.
- Menganalisis dan menyelenggarakan operasional kebijakan teknis di Segway Dinas.
- Mengkoordinasikan penyusunan operasional kebijakan teknis di Segway Dinas.
- Mengkoordinasikan penyusunan administrasi kearsifan, keuangan, umum, kepegawaian dan barang-barang di Segway Dinas.
- Melaksanakan urusan teknis di Segway Dinas.
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepala provinsi sebagai bahan analisis dan pertanggungjawaban.
- Melaksanakan tugas tambahan lain yang diberikan oleh atasan/ Bupati, baik secara langsung maupun tidak.

Fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Pangan, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perikanan, Sarana dan Prasarana.



- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan Tenaga, Perencanaan, Pemasukan dan Kesehatan Herwan, Tanaman Pangan dan Hektikultura, Bidang Prasarana, Sarana dan Fasilitas.
- c. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan.
- d. Penanaman, tradisi dan pelaksanaan tugas pemerintahan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, ketripan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan.
- e. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemerintahan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, ketripan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan.

2.1.2.3 Sekretaris

Secara umum tugas sekretaris ialah membantu, yang meliputi tugas: mengkoordinasikan, menerima dan melaksanakan, mengorganisasi, mengatur dan melaksanakan kegiatan di Sekretariat Dinas Kabupaten/Kabupaten dan perantara.

Tugas Tugas Sekretaris meliputi:

- a. Menyusun rencana kerja dan tahun dan tahunan di lingkungan Sekretariat dan lingkungan Dinas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- c. Menyusun pengumuman dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, ketripan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan dan urusan rumah tangga.
- d. Menyusun pelaksanaan pemeliharaan organisasi dan tata usaha.
- e. Menyusun pelaporan Dinas.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang urusan tertentu.
- g. Mengkoordinasikan penyediaan tata usaha sesuai dengan persyaratan perencanaan dan pelaporan Dinas.
- h. Mengorganisasi rencana kerja sekretariat dan karya Dinas.
- i. Mengorganisasi dan memantau karya pegawai di lingkungan sekretariat.



1. Menyampaikan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Fungsi :

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang urusan sekretariat;
- b. Mengembangkan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsifan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokoliran;
- c. Membantu insidensi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsifan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokoliran;
- d. Pelaksanaan pengabdian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsifan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokoliran.

Sekretariat terdiri dari :

1. Penasehat Atasi Muda Sub Koordinator Perencanaan Dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
3. Anisa Anggraeni Atasi Muda Sub Koordinator Keuangan.

2.1.2.3 Bidang Kehumasan Pengas

bidang kehumasan bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan terkait dengan ketatausahaan Pengas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.

Urutan tugas bidang Kehumasan Pengas meliputi :

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang ketatausahaan Pengas berdasarkan program kerja organisasi serta patuh pada jurnalan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Memonitoring tugas kepada bawahan di lingkungan bidang ketatausahaan Pengas sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan lancar dan efisien;





- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Kesehatan Pangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kegiatan Eksekutif dan Koordinasi Pangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- e) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kegiatan Distribusi dan Ditinjau Pangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- f) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kegiatan Pengawasan dan Kesehatan Pangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- g) Mengoordinasi pelaksanaan tugas teknis di lingkup Bidang Kesehatan Pangan dengan para mantri/tingkat setara jukrasa yang terkait dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan pertukaran ilmu di masa yang akan datang;
- h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang Kesehatan Pangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Kesehatan Pangan terdiri dari:

- a. Sub-Koordinator Koordinasi dan Eksekusi Pangan;
- b. Sub-Koordinator Distribusi dan Ditinjau Pangan Pangan;
- c. Sub-Koordinator Eksekusi, Pengawasan/Pengelolaan Pangan dan Kesehatan Pangan.



2.1.2.4 Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Tugas tugas Bidang Perkebunan meliputi :

1. menyajikan rencana operasional rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan di lingkungan bidang Perkebunan berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang diwujudkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan struktur dan jabatan agar tidak terjadi kesimpang siuran pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan kebijakan teknis bidang Perkebunan sebagai pedoman kerja;
5. menyajikan bentuk pelaksanaan kebijakan teknis perkembangan tanaman perkebunan;
6. menyajikan bentuk pelaksanaan kebijakan teknis pada proses dan pengendalian hasil tanaman perkebunan;
7. menyajikan bentuk pelaksanaan kebijakan teknis budidaya tanaman perkebunan;
8. menyajikan tugas-tugas lain yang diberikan dan ditugaskan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi;
9. mengorganisir rencana kerja, kebijakan, kajian, dan regulasi di Bidang Perkebunan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
10. mengorganisir, memonitor dan menilai hasil kinerja pegawai di Bidang Perkebunan;
11. menyajikan laporan pelaksanaan tugas bidang perkebunan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan





akuntabilitas kinerja; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perkebunan terdiri dari:

- a. Sub-Koordinator Produksi Perkebunan;
- b. Sub-Koordinator Perawatan dan Perlindungan Perkebunan;
- c. Sub-Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.

2.1.2.5 Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pelaksanaan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Tugas tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan program kerja regional serta petunjuk pelaksanaan integrasi program pembangunan tugas;
- b. menyalurkan tugas kepada berbagai instansi dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada berbagai di lingkungan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan urusan dan bimbingan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pertanian dan perikanan tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan urusan dan bimbingan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait hortikultura tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;





- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan urusan dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengalihan dan pemindahan tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.
- g. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan penilaian kinerja di masa yang akan datang dan
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:

- A. Sub-Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- B. Sub-Koordinasi Prilaku Tanaman Pangan dan Hortikultura
- C. Sub-Koordinasi Pengawasan dan Penilaian Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.1.2.6. Bidang Perantara, Sarana dan Penyuluhan

Bidang Perantara, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan pemeliharaan berbagai teknik, serta pemertamaan dan evaluasi di Bidang Perantara, Sarana dan Penyuluhan.

Tugas-tugas Bidang Perantara, Sarana dan Penyuluhan meliputi :

- A. menyusun rencana kerja dan program kerja (misal teknis) dan tindakan di lingkungan Bidang Perantara, Sarana dan Penyuluhan.
- B. mengidentifikasi tugas kepada berbagai instansi dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.



- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Perikanan, Sernas dan Perikanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- e. pemberian bimbingan pengawasan pelaksanaan produksi ternak di Bidang Perikanan, Sernas dan Perikanan;
- f. penanaman dan evaluasi di Bidang Perikanan, Sernas dan Perikanan;
- g. mengontrol pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perikanan, Sernas dan Perikanan dengan cara menandatangani semua rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan pertanggung jawaban di mana yang akan datang;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan, Sernas dan Perikanan sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan secara berkala sebagai bahan dokumentasi kinerja;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perikanan, Sernas dan Perikanan terdiri :

- a. Sub-Koordinator Lahan, Rigid dan Perikanan;
- b. Sub-Koordinator Pupuk, Paksiata dan Air Laut Perikanan;
- c. Sub-Koordinator Perikanan;

3.1.2.7 Bidang Perikanan dan Kesehatan Hewan

Bidang Perikanan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, dan penelitian serta penyusunan data, data pemeliharaan dan evaluasi di Bidang Perikanan dan Kesehatan Hewan.

Trajin tugas Bidang Perikanan dan Kesehatan Hewan meliputi :



- a. menyiapkan rencana operasional di lingkungan bidang Perencanaan dan Kesehatan Hewan berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang diistruksikan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketuntasan dan penerapan agar tidak terjadi keselisan dalam pelaksanaan tugas;
- d. berupaya terus memantau pelaksanaan kegiatan di Bidang Perencanaan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan ketuntasan dan penerapan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- e. membantu bawahan penerapan peringatan produksi ternak di Bidang Perencanaan dan Kesehatan Hewan;
- f. memantau dan menilai di Bidang Perencanaan dan Kesehatan Hewan;
- g. mengorganisir pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Kesehatan Hewan dengan cara mengkoordinasikan semua rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan pertukaran pikiran di mana yang akan datang;
- h. mengaudit laporan pelaksanaan tugas bidang Perencanaan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perencanaan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Sub-Koordinator Perencanaan dan Produksi;
- b. Sub-Koordinator Kesehatan Hewan;
- c. Sub-Koordinator Kesehatan Masyarakat, Veteriner, Perikanan dan Peternakan.





2.1.3 Sumber Daya Perangkat Lunak

Sumber daya perangkat lunak merujuk pada elemen riil yang termasuk dalam sumber daya yang dimiliki Dalam Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia dan aset modal.

2.1.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kemampuan organisasi akan bergantung pada sarana dan prasarana juga sangat berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku utama dalam menjalankan tugas fungsi masing-masing lembaga. Jumlah personal di Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten Kabupaten Dafurot adalah sebanyak 74 orang dengan status PNS sebanyak 65, CPNS 1 Orang, PPPK 8 orang, PTT 10 orang dan tenaga THL 7 orang. Selain itu terdapat 4500 PNS, CPNS, PTT, THL, maupun posisinya, yang terdapat dan going.



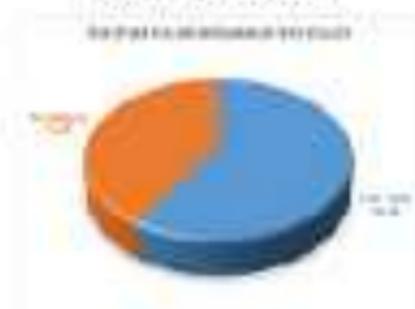


Tabel 2.1.3.1.1 Jumlah PUS Dalam Kehadiran Pegawai dan Partisipan Berdasarkan Fungsi/ Golongan di Tahun 2022

No	Fungsi/Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
01	02	03	04	05
1	Manajemen (Man / Ma)	1	0	1
2	Keahlian (K / K)	1	0	1
3	Keahlian (Ta)	1	1	2
4	Manajemen (G)	0	11	11
4	Manajemen (G)	4	4	8
4	Keahlian (K / K)	1	18	19
3	Keahlian (Ta)	11	0	11
1	Keahlian (K / K)	1	0	1
4	Keahlian (K / K)	4	0	4
3	Keahlian (K / K / G)	0	0	0
10	Keahlian (K / K)	0	0	0
Jumlah		12	33	45

Gambar 2.1

Persebaran Pegawai Dalam Kehadiran Pegawai dan Partisipan Berdasarkan Jenis Kelamin



Jika dilihat dari jenis kelamin, pegawai di Dinas Kesehatan Pangan dan Partisipan lebih banyak berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 55,56 % dan perempuan sebanyak 44,44 %, persebaran pegawai berjenis kelamin laki - laki tersebut banyak berada di Unit - unit pelaksana teknis seperti BPP, PUSKERTAWAN dan BPP.



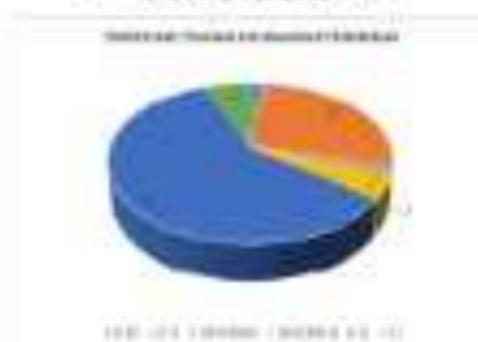


Tabel 2.1.3.1.3 Jumlah PNS, OPD, PPPK, Dosen Ketenagaan Pagan dan Pertenan Kabupaten Rokan Niasurut Pendidikan Tahun 2022

Kategori	PNS		OPD		PPPK		Dosen		Total
	P	OP	P	OP	P	OP	P	OP	
PNS	1	0	0	0	0	0	0	0	1
OPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPPK	11	0	11	0	0	0	0	0	11
Dosen II	1	0	1	0	0	0	0	0	1
Dosen III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DA	14	0	14	0	0	0	0	0	14
DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	26	0	26	0	0	0	0	0	26

Gambar 2.1

Persentase Pegawai Dinas Ketenagaan Pagan dan Pertenan Berdasarkan Pendidikan



Keterkaitan pendidikan, jumlah pegawai di dinas ketenagaan Pagan dan Pertenan sebagai di tulis sebanyak 26 orang (69,23%), pendidikan SLTA sebanyak 6 orang (23,08%), pendidikan SLTP sebanyak 0 orang (0,00%), pendidikan D3 sebanyak 2 orang (7,69%), dan pendidikan D4 sebanyak 0 orang (0,00%).



Dalam melaksanakan tugas Dinas Kesehatan Fungsional dan Pelayanan dan Pelaksanaan Kabupaten Bekasi didukung oleh sarana dan prasarana sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.1.3.1.3 Defisit Sarana Dan Prasarana Pelaksanaan Dinas Kesehatan Fungsional dan Pelayanan Tahun 2022

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	
		Ada	Belum
SARANA BANGUNAN			
1	Ruangan ruang kelas	1	4 unit
2	Ruangan perambatan	1	4 unit
3	Ruangan poliklinik	1	3 unit
4	Ruangan ruang pertemuan	1	15 unit
5	WC	1	4 unit
6	Sarung Dapur	1	2 unit
SLOT KEMERDEKAAN			
1	Unit Klinik	1	4 unit
2	Unit Puskesmas	1	2 unit
3	Perawatan rawat inap	1	17 unit
SLOT SARANA DAN PRASARANA			
1	Unit tidur	1	10 unit
2	Unit toilet	1	10 unit
3	Tempat tidur	1	15 unit
4	WC	1	10 unit
5	Kemah	1	10 unit
6	Unit Ruang	1	1 unit
7	Tempat	1	10 unit
8	Unit WC	1	10 unit
9	Unit Ruang	1	10 unit
10	Ruangan	1	1 unit
11	Unit Ruang	1	4 unit





No	Jumlah Aset dan Liabilitas		Saldo
	2014	2015	
22	Perang, Sekeloa dan		60.000
23	ASPI		4.000
24	Tanah kosong		1.000
25	Bangunan		1.000
26	Alat-alat		4.000
27	Salinan		4.000
28	Pembayaran		1.000
29	Saldo awal		66.000

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dalam upaya pencapaian ideanya pembangunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dituntutlah terdapatnya sarana pendukung seperti alat dan mesin pertanian, berikut alat dan mesin pertanian yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian :

Tabel 3.1.3.1.a. Jumlah Alat dan Mesin milik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian s.d Tahun 2014

No	Nama	Jumlah	
		2014	2015
1	Budidaya	0	0
2	Panen	0	0
3	Pemasaran	0	1
4	Salah satunya	0	1





2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bukarua memiliki peranan penting dalam kerjanya dengan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Bukarua. Mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dinas, pelaksanaan kegiatan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu:

1. Pelayanan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan di bidang pangan dan pertanian
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pencapaian Strategi Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Bukarua merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintahan Kabupaten Bukarua serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Kinerja pelayanan dapat diukur dari derajat capaian yang diperoleh ditentangkannya dengan target yang telah ditetapkan pada Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Bukarua dengan kinerja masing-masing program. Untuk menilai sejauh mana kinerja strategi dapat diwujudkan, dibutuhkan pengalokasian terhadap capaian kinerja dengan memalui indikator yang telah ditetapkan. Berikut indikator kinerja utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bukarua tahun 2021-2024





Tabel 2.1.4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Pungut dan Pemenuhan Kabupaten Narada tahun 2021-2024

Kategori	Indikator Kinerja	Berkas awal 2021	Tahun					Berkas akhir 2024
			2021	2022	2023	2024	2024	
Indikator Pemenuhan dan Pungut Biaya-Biaya Lain-lain	Pemenuhan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan, sebagai pengisi data (juga) akan dilakukan	21.21%	21.21%	22.07%	21.21%	21.21%	21.21%	21.21%
Indikator Dampak Sosial	Praktik Sejahtera Keluarga	28.200	28.785	30.200	30.800	31.212	32.800	34.800
Pemeriksaan Kesehatan								
Indikator Pemenuhan Biaya Hidup	Nilai tetap	7,12	7,07	7,08	8,22	8,22	8,22	8,22
Indikator Pemenuhan Kegiatan Kesehatan	nilai kegiatan kesehatan	4,24	4,24	4,27	4,24	4,24	4,24	4,24

Realisasi dan Capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Pungut dan Pemenuhan Daerah Kabupaten Narada berdasarkan catatan, target rencana tahun 2022-2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.4.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 - 2024

Indikator Kinerja	Berkas awal 2022	Tahun					Target		
		2022	2023	2024	2024	2024	2024	2024	
Pemenuhan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan	21.21%	21.21%	22.07%	21.21%	21.21%	21.21%	21.21%	21.21%	
Pemenuhan Dampak Sosial	28.200	28.785	30.200	30.800	31.212	32.800	34.800	34.800	
Nilai tetap	7,12	7,07	7,08	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	
Indikator Pemenuhan Kegiatan Kesehatan	4,24	4,24	4,27	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	

*) merupakan indikator kinerja utama

Mendapatkan data capaian kinerja secara Dinas Kesehatan Pungut dan Pemenuhan Kabupaten Narada dari tahun 2022 hingga 2024, berikut adalah hasil analisis dan hasil pengisian indikator kinerja secara:

1. Pemenuhan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan (ketersediaan fasilitas kesehatan, pengisi data, pengisi data kabupaten)





Pertumbuhan ketersediaan pangan di yang ada selama tiga tahun terakhir menunjukkan capaian yang tidak memuaskan. Hal ini disebabkan adanya persepsi yang perhitungan di mana pada realisasi tahun 2022 sd 2023 menggunakan komponen variabel komoditi pangan yang berbeda menjadi komponen untuk menghitung ketersediaan pangan yang masih menunjukkan capaian melebihi 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Natuna relatif aman. Dengan capaian realisasi ketersediaan pangan pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang rendah. Hal ini dikarenakan perhitungan komponen yang tidak menggunakan ketersediaan pangan yang merupakan intervensi pemerintah tingkat daerah memastikan komoditi pangan yang beredar di masyarakat. Berikut tabel perhitungan ketersediaan pangan tahun 2022 sd tahun 2024

Tabel 2.1.4.3 Ketersediaan pangan tahun 2022 - 2024

Kategori Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	jumlah	satuan	jumlah	satuan	jumlah	satuan
1. Jumlah Produksi (Beras)	81.1	Ton	87.18	Ton		
2. Stok BPP	1.89	Ton	1.111	Ton	1.89	Ton
3. PDB	11.23	Ton	7.517	Ton		
4. Sisa Pangan dan Impor/ekspor (beras)	8.889.85	Ton	1.488	Ton		
5. Sisa Pangan (beras dan jagal)	8.889.85	Ton	1.488	Ton		
total	8.889.85	Ton	8.889.85	Ton		
jumlah ketersediaan pangan	8.889.85	Ton	1.000.0	Ton		
Perhitungan Ketersediaan Pangan = jumlah Pangan Pangan / jumlah Penduduk	100.00	Ton	81.00	Ton		
- 100%						
Perhitungan Ketersediaan Pangan = jumlah Pangan Pangan / jumlah Penduduk	100.00	Ton	81.00	Ton		
Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Natuna (Laporan 2022) = 100% 81 - 81,00						

Kesimpulan

Terdapat Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama "Pemerataan Ketersediaan Pangan", Perlu adanya pemahaman dan persepsi yang sama bahwa Ketersediaan Pangan merupakan sebuah beban pangan yang tersedia dan cukup sesuai kebutuhan baik yang disediakan oleh pihak swasta ataupun pemerintah dalam ketersediaan yang itu dilaksanakan





atau bahan yang tersedia dengan kebutuhan yang diperlukan yang akan mengakibatkan kondisi aman atau kebutuhan pangan daerah. Idealnya ketersediaan pangan suatu daerah adalah lebih dari 100 %. Hal ini menunjukkan ada kelebihan produksi pangan sebagai cadangan yang bewir bukan semua mata bahan pangan yang diolah dan diperjual.

2. Produksi Sektor Pertanian

Resistensi capaian produksi pertanian masyarakat kondisi yang cukup baik dimana target produksi tidak tercapai. Kondisi ini disebabkan adanya perubahan pola lahan pertanian, kondisi pertanian khususnya tanaman perkebunan yang sebagian besar tidak produktif lagi akibat tidak adanya pemeliharaan kembali dan berkurangnya lahan lahan perkebunan. Hal ini ini diperparah oleh terjadinya krisis produksi seperti pupuk sehingga sebagian besar tanaman perkebunan tidak panen akibat yang juga akibatnya merupakan produksi sendiri atau tidak terorganisir. Petani ada yang menjadi penyewa sementara produksi pertanian dengan partner lain perkebunan akibat tidak adanya modal atau produksi dengan negara produksi sehingga banyak tanaman khususnya tanaman perkebunan diletakkan tanpa pemeliharaan atau produksi tidak dapat karena harga jual rendah. Selain itu terjadi terkendala dalam pencapaian target yang tidak realistis akibat terputusnya komunikasi atau yang tidak sehingga mengakibatkan data yang digunakan tidak tepat. Kondisi ini menyebabkan tidak tercapainya antara kondisi ini selang-seling dengan target yang dibuat. Berikut komposisi dalam perhitungan produksi sektor pertanian :

Tabel 2.1.4.2 Produksi Tanaman Pangan (Padi) Tahun 2000 - 2004

No.	Kategori	Tahun 2000		Tahun 2001		Tahun 2002	
		Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Padi	11.00	0.41	11.41	0.41	11.00	0.31
	Jumlah	11.00	0.41	11.41	0.41	11.00	0.31



Tabel D.1.4.3 Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2022 - 2024

No.	Kategori	Tahun		Perubahan
		2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Padi	25,71	1,122	
2	Kacang-Gandum	122,22	1,122	
3	Ubi Jalar	2,122	2,122	
4	Ubi Kayu	122,22	122,22	
5	Pisang-Tanih	2,122	2,122	
Jumlah		122,22	1,122	

Tabel D.1.4.4 Produksi Hortikultura (Ton) Tahun 2022 - 2024

No.	Kategori	Tahun		Perubahan
		2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Manis/Beras	1,122	2,122	
2	Manis/Kacang	2	1,122	
3	Pisang/Beras	22,22	22,22	
4	Bawang	2,122	2,122	
5	Bawang	2,122	2,122	
6	Bawang Merah	1,122	1,122	
7	Bawang Putih	22,22	22,22	
8	Bawang Merah	2,122	22,22	
9	Bawang Putih	22,22	22,22	
10	Kentang	2,122	22,22	
11	Kentang	22,22	22,22	
12	Kentang	22,22	22,22	
13	Kentang	2,122	22,22	
14	Kentang	2,122	22,22	
15	Kentang	2,122	22,22	
16	Kentang	2,122	22,22	
17	Kentang	2,122	22,22	
18	Kentang	2,122	22,22	
19	Kentang	2,122	22,22	
20	Kentang	2,122	22,22	
21	Kentang	2,122	22,22	
22	Kentang	2,122	22,22	
23	Kentang	2,122	22,22	
24	Kentang	2,122	22,22	
25	Kentang	2,122	22,22	
26	Kentang	2,122	22,22	
27	Kentang	2,122	22,22	
28	Kentang	2,122	22,22	
29	Kentang	2,122	22,22	
30	Kentang	2,122	22,22	
31	Kentang	2,122	22,22	
32	Kentang	2,122	22,22	
33	Kentang	2,122	22,22	
34	Kentang	2,122	22,22	
35	Kentang	2,122	22,22	
36	Kentang	2,122	22,22	
37	Kentang	2,122	22,22	
38	Kentang	2,122	22,22	
39	Kentang	2,122	22,22	
40	Kentang	2,122	22,22	
41	Kentang	2,122	22,22	
42	Kentang	2,122	22,22	
43	Kentang	2,122	22,22	
44	Kentang	2,122	22,22	
45	Kentang	2,122	22,22	
46	Kentang	2,122	22,22	
47	Kentang	2,122	22,22	
48	Kentang	2,122	22,22	
49	Kentang	2,122	22,22	
50	Kentang	2,122	22,22	
51	Kentang	2,122	22,22	
52	Kentang	2,122	22,22	
53	Kentang	2,122	22,22	
54	Kentang	2,122	22,22	
55	Kentang	2,122	22,22	
56	Kentang	2,122	22,22	
57	Kentang	2,122	22,22	
58	Kentang	2,122	22,22	
59	Kentang	2,122	22,22	
60	Kentang	2,122	22,22	
61	Kentang	2,122	22,22	
62	Kentang	2,122	22,22	
63	Kentang	2,122	22,22	
64	Kentang	2,122	22,22	
65	Kentang	2,122	22,22	
66	Kentang	2,122	22,22	
67	Kentang	2,122	22,22	
68	Kentang	2,122	22,22	
69	Kentang	2,122	22,22	
70	Kentang	2,122	22,22	
71	Kentang	2,122	22,22	
72	Kentang	2,122	22,22	
73	Kentang	2,122	22,22	
74	Kentang	2,122	22,22	
75	Kentang	2,122	22,22	
76	Kentang	2,122	22,22	
77	Kentang	2,122	22,22	
78	Kentang	2,122	22,22	
79	Kentang	2,122	22,22	
80	Kentang	2,122	22,22	
81	Kentang	2,122	22,22	
82	Kentang	2,122	22,22	
83	Kentang	2,122	22,22	
84	Kentang	2,122	22,22	
85	Kentang	2,122	22,22	
86	Kentang	2,122	22,22	
87	Kentang	2,122	22,22	
88	Kentang	2,122	22,22	
89	Kentang	2,122	22,22	
90	Kentang	2,122	22,22	
91	Kentang	2,122	22,22	
92	Kentang	2,122	22,22	
93	Kentang	2,122	22,22	
94	Kentang	2,122	22,22	
95	Kentang	2,122	22,22	
96	Kentang	2,122	22,22	
97	Kentang	2,122	22,22	
98	Kentang	2,122	22,22	
99	Kentang	2,122	22,22	
100	Kentang	2,122	22,22	
Jumlah		22,22	22,22	

Tabel D.1.4.5 Produksi Tanaman Hortikultura (Ton) Tahun 2022 - 2024

No.	Kategori	Jumlah Produksi (Ton)		Perubahan
		2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tomat	12,22	1,122	
2	Kentang	22,22	2,122	
3	Kentang	2,122	2,122	
Jumlah		22,22	2,122	



Tabel 2.14.2 Produksi Daging dan Telur Tahun 2022 - 2024

No.	Kategori	Produksi daging dan telur (ton)		Sektor
		2022	2023	
1	Sapi	13.000	13.000	
2	Kambing	0.000	0.000	
3	Telur ayam	10.0	10.000	
4	Telur bebek	11.000	11.000	
5	Telur ikan	15.000	15.000	
6	Telur lain		0.000	
Jumlah		39.000	39.000	

Kesimpulan

Terkait realisasi capaian Indikator Kinerja Utama "Produksi Sektor Pertanian", diperlukan intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga jual komoditi pertanian dan perkabupaten sehingga dengan besarnya sektor pertanian dan perkabupaten dapat menjadi pilihan yang menjanjikan dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu intervensi pemerintah dalam penyediaan sarana produksi seperti pupuk subsidi masih terbatas pada komoditi tertentu khususnya komoditi jagung dan telur sehingga komoditi pertanian yang tidak komoditi pemerintah diharapkan dapat bertumbuh dengan baik. Dengan intervensi pemerintah dalam hal harga dan penyediaan pupuk subsidi mendorong meningkatnya produksi yang diharapkan.

2. Nilai Laki

Nilai LAKIP menunjukkan performa yang positif menunjukkan target capaian tercapai antara lain tercapai 60 - 70 tercapai aktual nilai laki dari tahun 2022 - 2024, kondisi ini mencerminkan prestasi organisasi yang perlu perhatian agar kondisi tersebut terus baik.

Kesimpulan

Adanya aktualisasi nilai laki dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja fungsi - fungsi yang ada dalam organisasi dengan capaiannya, ini



ini menyebabkan tujuan dan sasaran organisasi serta program-program yang ada tidak dapat dicapai secara maksimal. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khususnya pada unsur-unsur pimpinan yang ada dalam lingkungan organisasi untuk memberdayakan sumber daya yang ada untuk kedepan.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan performansi yang cukup baik dimana terjadi kenaikan yang konsisten dan terus menerus. Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga dapat diperoleh nilai index yang maksimal.

Kesimpulan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang menunjukkan peningkatan yang konsisten mengindikasikan bahwa komponen yang menjadi bagian dari pelayanan sudah berjalan dengan baik dan terjadi peningkatan nilai tambah layanan yang memuaskan serta fungsi/fungsi yang ada berjalan with baik dan waktu service sesuai standar yang ditetapkan dalam organisasi.

4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk menilai pencapaian kinerja perusahaan dalam aspek tugas pokok dan fungsinya, yaitu dalam katakana Pasang dan Pertanahan yaitu pada urusan Pasang dan Urusan Pertanahan yang memiliki karakteristik kegiatan dengan pencapaian melalui strategi nasional, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.4.9 Realisasi capaian indikator kinerja kunci Dinas Katakana Pasang dan Pertanahan tahun 2023 - 2024.

No	Indikator Kinerja Kunci	Uraian	2023			2024			Tercapai	Tingkat Pencapaian
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Kelembagaan	Kelembagaan	100	100	100	100	100	100	100	
2	Kelembagaan	Kelembagaan	100	100	100	100	100	100	100	
3	Kelembagaan	Kelembagaan	100	100	100	100	100	100	100	
4	Kelembagaan	Kelembagaan	100	100	100	100	100	100	100	
5	Kelembagaan	Kelembagaan	100	100	100	100	100	100	100	
6	Kelembagaan	Kelembagaan	100	100	100	100	100	100	100	
7	Kelembagaan	Kelembagaan	100	100	100	100	100	100	100	
8	Kelembagaan	Kelembagaan	100	100	100	100	100	100	100	
9	Kelembagaan	Kelembagaan	100	100	100	100	100	100	100	
10	Kelembagaan	Kelembagaan	100	100	100	100	100	100	100	



Kategori	Sub-kategori	Tahun						Total	Rata-rata
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Kategori A	Sub-kategori A.1	1	1	1	1	1	5	1	
	Sub-kategori A.2	1	1	1	1	1	5	1	
Kategori B		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori C		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori D		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori E		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori F		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori G		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori H		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori I		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori J		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori K		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori L		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori M		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori N		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori O		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori P		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori Q		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori R		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori S		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori T		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori U		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori V		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori W		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori X		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori Y		1	1	1	1	1	5	1	
Kategori Z		1	1	1	1	1	5	1	

Secara umum capaian indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Ketersediaan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegara tahun 2022 - 2024 menunjukkan kinerja yang cukup baik, baik urusan pangan maupun pertanian. Namun masih ada indikator urusan yang tidak tercapai khususnya urusan pertanian seperti kinerja pertanian yang diharapkan dimana tidak melakukan kajian terhadap pascapanen sehingga kegiatan yang terkait dengan dan produksi yang akan diberikan kepada masyarakat tidak terlaksana dan "produksi sektor pertanian". Kondisi ini disebabkan kurangnya kajian pada saat perencanaan dengan menetapkan target yang tidak realistis, selain itu juga karena data yang lemah sehingga mengakibatkan data yang diperoleh tidak tepat. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya upaya awal di lapangan dengan target yang dibuat.

Kesimpulan

1. Tidak tercapai Realisasi capaian indikator kinerja kunci Dinas Ketersediaan Pangan dan Pertanian khususnya pada beberapa indikator urusan pangan, sangat terkait dengan kondisi lapangan dimana yang terjadi secara umum uraian 2022 di 2024, dimana capaian terwujud terhitung dengan besarnya anggaran yang terjadi.
2. Beberapa Realisasi capaian indikator kinerja kunci Dinas Ketersediaan Pangan dan Pertanian khusus urusan pertanian yang tidak tercapai, lebih disebabkan kurangnya pemantauan pascapanen sebagai penyerta tidak melakukan pascapanen.

Kategorie		Menge		Preis		Wert	
Code	Text	Einheit	Menge	Preis	Einheit	Menge	Preis
Kategorie 1							
001	Produkt 1	Stück	100	10	001	100	10
002	Produkt 2	Stück	200	20	002	200	20
Kategorie 2							
003	Produkt 3	Stück	150	15	003	150	15
004	Produkt 4	Stück	300	30	004	300	30
Kategorie 3							
005	Produkt 5	Stück	120	12	005	120	12
006	Produkt 6	Stück	250	25	006	250	25
Kategorie 4							
007	Produkt 7	Stück	180	18	007	180	18
008	Produkt 8	Stück	350	35	008	350	35
Kategorie 5							
009	Produkt 9	Stück	140	14	009	140	14
010	Produkt 10	Stück	280	28	010	280	28
Kategorie 6							
011	Produkt 11	Stück	160	16	011	160	16
012	Produkt 12	Stück	320	32	012	320	32
Kategorie 7							
013	Produkt 13	Stück	110	11	013	110	11
014	Produkt 14	Stück	220	22	014	220	22
Kategorie 8							
015	Produkt 15	Stück	190	19	015	190	19
016	Produkt 16	Stück	380	38	016	380	38
Kategorie 9							
017	Produkt 17	Stück	130	13	017	130	13
018	Produkt 18	Stück	260	26	018	260	26
Kategorie 10							
019	Produkt 19	Stück	170	17	019	170	17
020	Produkt 20	Stück	340	34	020	340	34
Kategorie 11							
021	Produkt 21	Stück	150	15	021	150	15
022	Produkt 22	Stück	300	30	022	300	30
Kategorie 12							
023	Produkt 23	Stück	120	12	023	120	12
024	Produkt 24	Stück	240	24	024	240	24
Kategorie 13							
025	Produkt 25	Stück	180	18	025	180	18
026	Produkt 26	Stück	360	36	026	360	36
Kategorie 14							
027	Produkt 27	Stück	140	14	027	140	14
028	Produkt 28	Stück	280	28	028	280	28
Kategorie 15							
029	Produkt 29	Stück	160	16	029	160	16
030	Produkt 30	Stück	320	32	030	320	32
Kategorie 16							
031	Produkt 31	Stück	110	11	031	110	11
032	Produkt 32	Stück	220	22	032	220	22
Kategorie 17							
033	Produkt 33	Stück	190	19	033	190	19
034	Produkt 34	Stück	380	38	034	380	38
Kategorie 18							
035	Produkt 35	Stück	130	13	035	130	13
036	Produkt 36	Stück	260	26	036	260	26
Kategorie 19							
037	Produkt 37	Stück	170	17	037	170	17
038	Produkt 38	Stück	340	34	038	340	34
Kategorie 20							
039	Produkt 39	Stück	150	15	039	150	15
040	Produkt 40	Stück	300	30	040	300	30

2. **Background** 3

3. **Methodology** 4

4. **Results** 5

5. **Discussion** 6

6. **Conclusion** 7

7. **References** 8

8. **Appendix** 9



Berdasarkan data tabel Realisasi Capaian Kinerja Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Natura diatas. Secara umum realisasi Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 sd tahun 2024 mencapai 100 % tetapi terdapat satu program yang tidak terlaksana yaitu Program Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pertanahan, Kegiatan Kegiatan Pengalokasian Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Keragaman Kabupaten/Dkota, Sub Kegiatan Peningkatan Mutu SDG Hewan/Tumbuhan diantar kegiatan tidak terlaksana akibat disebabkan juga karena adanya realisasi anggaran.

Kesimpulan

Terdapat tidak tercapainya kinerja pada salah satu program yaitu Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pertanahan, Kegiatan Kegiatan Pengalokasian Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan telah dibuktikan adanya realisasi nilai anggaran dan serah.

2.1.5 kelompok sasaran terapan

Untuk mewujudkan peran strategi dalam keberhasilan dan keberhasilan kegiatan strategis jangka dan periode. Identifikasi terhadap kelompok sasaran pelayanan menjadi langkah penting dalam memastikan tercapainya program dan kegiatan yang disusun dapat menunjang dan harapan penerima manfaat, kelompok sasaran terapan mencakup:

1. Kelompok Daerah Tertentu

Kelompok sasaran ini terdapat terkait dengan penyelenggaraan urusan pangan dan pertanian seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan Nelayan, Lembaga Penelitian dan Pertahanan, Dinas Pertanian Urusan dan Pertanian Hewan dan, Dinas Kesehatan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Wortensi Kabupaten Wku serta Dinas terkait lainnya

2. Kementerian, Lembaga dan Badan Usaha

Berkaitannya urusan terkait, Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian menjalin koordinasi dengan kementerian seperti Kementerian Pertanian,



Keputusan, Dialog dan EFD dalam upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pembangunan pertanian.

4. Pelaku Usaha, Masyarakat dan Kelompok tani.

Kelompok usaha sebagai mitra dalam penyediaan dan pemeliharaan bahan pangan, masyarakat tani dan kelompok tani sebagai pelaku utama dan mengfungsikan bahan makanan.

2.1.6 Misi Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian menjadi kesatuan dengan lembaga lain instansi pemerintahan terkait dengan seperti BULOG, Kementerian ini berisikan terkait penyediaan dan pengalihan Ditinjau Pangan Pemerintah (DPP)

2.2. Permasalahan dan isu strategis Perangkat daerah

Terjadi kesenjangan dalam perencanaan pembangunan daerah, perubahan strategi melalui permasalahan telah menjadi identifikasi, permasalahan, hingga hasil menjadi aspek yang tidak ada pemertama kebijakan yang akan diadani. Muncul masalah permasalahan pembangunan, pemerintah daerah dapat memberikan permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat sebagai bahan untuk kontribusi masyarakat akan masalah permasalahan pada lingkungan yang untuk pembangunan daerah, adanya, dan pola-pola ini dari permasalahan pembangunan, dapat diuraikan secara rasional tanpa program dan kegiatan yang dilaksanakan dan dilaksanakan akan sebagai penyelesaian permasalahan pembangunan.

Salah satu permasalahan permasalahan yang terdapat dari lingkungan lingkungan masyarakat daerah, Pemerintah Kabupaten Negeri dapat menjadi praksi strategi politik sebagai produk) sehingga bagi pembangunan pembangunan daerah. Permasalahan tersebut harus ditunjukkan dengan tepat sebagai bagian dari identifikasi untuk penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Negeri. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi dasar pemahaman untuk menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pembangunan dan tujuan masyarakat.



2.2.1 Permasalahan Perangkit Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Apek pembangunan kesehatan pangan yang mencakup ketersediaan ketersediaan dan keamanan pangan, sub sistem distribusi pangan, tindakan kontrol dan keamanan pangan cukup luas dan tersebar dengan berbagai sektor baik di tingkat, sehingga membutuhkan kebijakan yang terkoordinasi mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota.
2. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, antara jumlah kota yang terdapat ruang terdapat baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya menyebabkan tantangan dalam penyediaan pangan bagi penduduk, baik dari hasil produksi maupun penyediaan pangan pangan dari luar daerah.
4. Peningkatan produksi pangan terdapat karena potensi sumber daya alam belum dikelola secara optimal, perubahan iklim dan cuaca, dan jumlah petani yang semakin berkurang yang terdapat disebabkan minimnya minat generasi muda untuk menjadi petani.
5. Ketergantungan pasokan pangan yang tinggi dari luar daerah dan luar negeri dapat menyebabkan instabilitas harga pangan apabila terjadi gejolak harga pangan baik di dalam negeri maupun luar negeri.
6. Pengaruh kebijakan budaya dan kebiasaan makan yang tidak sehat dengan prinsip-prinsip nutrisi pangan terdapat, terdapat, camilan dan sereal.
7. Keadilan harga yang kurang baik dapat mengganggu ketersediaan bahan makanan yang menyebabkan ketersediaan pangan masyarakat, khususnya pada pulau-pulau yang sulit dijangkau (dalam akses transportasi);
8. Masih kurangnya penguatan keamanan pangan yang dilaksanakan oleh masyarakat.



2.2.3 Isi Strategi Perangai Daerah

Pembangunan pertanian berkelanjutan tidak hanya dibarengi oleh sektor produksi saja, namun juga berkaitan dengan pembangunan lainnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Peran pembangunan yang dilaksanakan perlu memperhatikan potensi dan isu yang dihadapi yang relevan dengan perangai daerah baik global, nasional maupun regional. Berikut permasalahan dan isu strategi Perangai daerah tahun 2020 - 2029 :

Tabel 2.2.3.1. Isu Strategi Perangai Daerah

Kategori Isu Strategis Perangai Daerah	Permasalahan		Isu Lokal yang Berdampak		Isu Regional, Nasional dan Internasional		Isu Strategis
	A	B	C	D	E	F	
Permasalahan							
Isu Lokal yang Berdampak							
Isu Regional, Nasional dan Internasional							

Sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Herina Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Narayan Perangai Daerah Kabupaten Herina, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Herina memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian sesuai dengan konsep tugasnya sesuai dengan arah kebijakan yang berada di atasnya dengan tetap mengedepankan prinsip *good government* dan *good governance*.

Berdasarkan capaian kerjanya periode sebelumnya yaitu tahun 2020-2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Herina sebagai berikut :

1. Masih terdapat tingkat ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah
2. Masih rendahnya penyediaan sarana dan prasarana ketahanan pangan
3. Nilai tambah petani rendah
4. Belum maksimalnya penguatan ketahanan pangan



III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAN HEBLIJARAN

Dalam mengembangkan peluang dan inovasi baru serta mengantisipasi tantangan ke depan menuju kotadiri yang dingginkan, Dinas Kesehatan Pungas dan Peralihan Kabupaten Netuna sebagai organisasi yang membantu Pemerintah Kabupaten Netuna sebagai pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan Kerangka Konsep Daerah di Bidang Kesehatan Pungas dan Peralihan, perlu perencanaan yang akurat dan dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang maksimal. Berkatungas dengan itu Dinas Kesehatan Pungas dan Peralihan Kabupaten Netuna harus mengacu pada misi Bupati Kabupaten Pungas yaitu "Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemandirian dan Keunggulan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan".

3.1 Tujuan

Dalam rangka mendukung pencapaian misi Pemerintah Daerah serta menghadapi situasi persaingan yang semakin kompleks, Dinas Kesehatan Pungas dan Peralihan menetapkan tujuan yaitu "Meningkatkan produktivitas sektor pelayanan dan manajemen pungsas melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik". Maksudnya tujuan tersebut sesuai dengan sasaran Pungsas dan Peralihan dikaitkan untuk meningkatkan seluruh proses pemerintahan, pemerintahan, pemerintahan, serta seluruh penyelenggaraan urusan sektor terpadu, terukur, dan dilaksanakan. Selain itu, tujuan ini juga melaksanakan komitmen Dinas Kesehatan Pungas dan Peralihan dalam mendukung kebijakan keberterangan dalam Dinas Kesehatan Pungas dan Peralihan.





1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran operasional dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran ini menjadi landasan dalam mengorganisir pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur, terstruktur, serta sesuai dengan arah pembangunan daerah. Berdasarkan Tujuan yang ditetapkan, maka sasaran yang ditetapkan Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian tahun 2022 - 2025 meliputi uraian pangan, uraian pertanian dan uraian perikanan yang terkait peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Berikut Sasaran yang ditetapkan berdasarkan TUJUAN organisasi tahun 2022 - 2025:

Tabel 3.2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2022-2025

Kategori Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tipe Sasaran						Unit
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Kualitas dan Keberhasilan Sektor Pertanian	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta keberlanjutan program pangan	Meningkatkan Kemampuan Manpower Sektor Pertanian	Penyuluhan Masyarakat	200	220	240	260	280	300	320
		Meningkatkan Kemampuan Sektor Perikanan	Penyuluhan Masyarakat	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500	
		Meningkatkan Kemampuan Sektor Perikanan	Penyuluhan Masyarakat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		Meningkatkan Kemampuan Sektor Perikanan	Penyuluhan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Untuk pencapaian pembangunan terkait uraian pangan dan pertanian sudah menjadi tanggungjawab bersama dalam rangka pencapaian tujuan dan cakupan luas daerah diutamakan arah pembangunan pembangunan melalui kompetensi Rencana Tahun 2024-2030 dapat diukur dengan tabel berikut ini.





Tabel 3.3.2. Penetapan Revisi secara SPJMD Kabupaten Kota Korupsi 2019 - 2020 terkait uraian Pagan dan Pertanahan

Revisi 1	Revisi 2	Revisi 3	Revisi 4	Revisi 5
Revisi 1 Revisi 2 Revisi 3 Revisi 4 Revisi 5 Revisi 6 Revisi 7 Revisi 8 Revisi 9 Revisi 10 Revisi 11 Revisi 12 Revisi 13 Revisi 14 Revisi 15 Revisi 16 Revisi 17 Revisi 18 Revisi 19 Revisi 20 Revisi 21 Revisi 22 Revisi 23 Revisi 24 Revisi 25 Revisi 26 Revisi 27 Revisi 28 Revisi 29 Revisi 30 Revisi 31 Revisi 32 Revisi 33 Revisi 34 Revisi 35 Revisi 36 Revisi 37 Revisi 38 Revisi 39 Revisi 40 Revisi 41 Revisi 42 Revisi 43 Revisi 44 Revisi 45 Revisi 46 Revisi 47 Revisi 48 Revisi 49 Revisi 50 Revisi 51 Revisi 52 Revisi 53 Revisi 54 Revisi 55 Revisi 56 Revisi 57 Revisi 58 Revisi 59 Revisi 60 Revisi 61 Revisi 62 Revisi 63 Revisi 64 Revisi 65 Revisi 66 Revisi 67 Revisi 68 Revisi 69 Revisi 70 Revisi 71 Revisi 72 Revisi 73 Revisi 74 Revisi 75 Revisi 76 Revisi 77 Revisi 78 Revisi 79 Revisi 80 Revisi 81 Revisi 82 Revisi 83 Revisi 84 Revisi 85 Revisi 86 Revisi 87 Revisi 88 Revisi 89 Revisi 90 Revisi 91 Revisi 92 Revisi 93 Revisi 94 Revisi 95 Revisi 96 Revisi 97 Revisi 98 Revisi 99 Revisi 100	Revisi 1 Revisi 2 Revisi 3 Revisi 4 Revisi 5 Revisi 6 Revisi 7 Revisi 8 Revisi 9 Revisi 10 Revisi 11 Revisi 12 Revisi 13 Revisi 14 Revisi 15 Revisi 16 Revisi 17 Revisi 18 Revisi 19 Revisi 20 Revisi 21 Revisi 22 Revisi 23 Revisi 24 Revisi 25 Revisi 26 Revisi 27 Revisi 28 Revisi 29 Revisi 30 Revisi 31 Revisi 32 Revisi 33 Revisi 34 Revisi 35 Revisi 36 Revisi 37 Revisi 38 Revisi 39 Revisi 40 Revisi 41 Revisi 42 Revisi 43 Revisi 44 Revisi 45 Revisi 46 Revisi 47 Revisi 48 Revisi 49 Revisi 50 Revisi 51 Revisi 52 Revisi 53 Revisi 54 Revisi 55 Revisi 56 Revisi 57 Revisi 58 Revisi 59 Revisi 60 Revisi 61 Revisi 62 Revisi 63 Revisi 64 Revisi 65 Revisi 66 Revisi 67 Revisi 68 Revisi 69 Revisi 70 Revisi 71 Revisi 72 Revisi 73 Revisi 74 Revisi 75 Revisi 76 Revisi 77 Revisi 78 Revisi 79 Revisi 80 Revisi 81 Revisi 82 Revisi 83 Revisi 84 Revisi 85 Revisi 86 Revisi 87 Revisi 88 Revisi 89 Revisi 90 Revisi 91 Revisi 92 Revisi 93 Revisi 94 Revisi 95 Revisi 96 Revisi 97 Revisi 98 Revisi 99 Revisi 100	Revisi 1 Revisi 2 Revisi 3 Revisi 4 Revisi 5 Revisi 6 Revisi 7 Revisi 8 Revisi 9 Revisi 10 Revisi 11 Revisi 12 Revisi 13 Revisi 14 Revisi 15 Revisi 16 Revisi 17 Revisi 18 Revisi 19 Revisi 20 Revisi 21 Revisi 22 Revisi 23 Revisi 24 Revisi 25 Revisi 26 Revisi 27 Revisi 28 Revisi 29 Revisi 30 Revisi 31 Revisi 32 Revisi 33 Revisi 34 Revisi 35 Revisi 36 Revisi 37 Revisi 38 Revisi 39 Revisi 40 Revisi 41 Revisi 42 Revisi 43 Revisi 44 Revisi 45 Revisi 46 Revisi 47 Revisi 48 Revisi 49 Revisi 50 Revisi 51 Revisi 52 Revisi 53 Revisi 54 Revisi 55 Revisi 56 Revisi 57 Revisi 58 Revisi 59 Revisi 60 Revisi 61 Revisi 62 Revisi 63 Revisi 64 Revisi 65 Revisi 66 Revisi 67 Revisi 68 Revisi 69 Revisi 70 Revisi 71 Revisi 72 Revisi 73 Revisi 74 Revisi 75 Revisi 76 Revisi 77 Revisi 78 Revisi 79 Revisi 80 Revisi 81 Revisi 82 Revisi 83 Revisi 84 Revisi 85 Revisi 86 Revisi 87 Revisi 88 Revisi 89 Revisi 90 Revisi 91 Revisi 92 Revisi 93 Revisi 94 Revisi 95 Revisi 96 Revisi 97 Revisi 98 Revisi 99 Revisi 100	Revisi 1 Revisi 2 Revisi 3 Revisi 4 Revisi 5 Revisi 6 Revisi 7 Revisi 8 Revisi 9 Revisi 10 Revisi 11 Revisi 12 Revisi 13 Revisi 14 Revisi 15 Revisi 16 Revisi 17 Revisi 18 Revisi 19 Revisi 20 Revisi 21 Revisi 22 Revisi 23 Revisi 24 Revisi 25 Revisi 26 Revisi 27 Revisi 28 Revisi 29 Revisi 30 Revisi 31 Revisi 32 Revisi 33 Revisi 34 Revisi 35 Revisi 36 Revisi 37 Revisi 38 Revisi 39 Revisi 40 Revisi 41 Revisi 42 Revisi 43 Revisi 44 Revisi 45 Revisi 46 Revisi 47 Revisi 48 Revisi 49 Revisi 50 Revisi 51 Revisi 52 Revisi 53 Revisi 54 Revisi 55 Revisi 56 Revisi 57 Revisi 58 Revisi 59 Revisi 60 Revisi 61 Revisi 62 Revisi 63 Revisi 64 Revisi 65 Revisi 66 Revisi 67 Revisi 68 Revisi 69 Revisi 70 Revisi 71 Revisi 72 Revisi 73 Revisi 74 Revisi 75 Revisi 76 Revisi 77 Revisi 78 Revisi 79 Revisi 80 Revisi 81 Revisi 82 Revisi 83 Revisi 84 Revisi 85 Revisi 86 Revisi 87 Revisi 88 Revisi 89 Revisi 90 Revisi 91 Revisi 92 Revisi 93 Revisi 94 Revisi 95 Revisi 96 Revisi 97 Revisi 98 Revisi 99 Revisi 100	Revisi 1 Revisi 2 Revisi 3 Revisi 4 Revisi 5 Revisi 6 Revisi 7 Revisi 8 Revisi 9 Revisi 10 Revisi 11 Revisi 12 Revisi 13 Revisi 14 Revisi 15 Revisi 16 Revisi 17 Revisi 18 Revisi 19 Revisi 20 Revisi 21 Revisi 22 Revisi 23 Revisi 24 Revisi 25 Revisi 26 Revisi 27 Revisi 28 Revisi 29 Revisi 30 Revisi 31 Revisi 32 Revisi 33 Revisi 34 Revisi 35 Revisi 36 Revisi 37 Revisi 38 Revisi 39 Revisi 40 Revisi 41 Revisi 42 Revisi 43 Revisi 44 Revisi 45 Revisi 46 Revisi 47 Revisi 48 Revisi 49 Revisi 50 Revisi 51 Revisi 52 Revisi 53 Revisi 54 Revisi 55 Revisi 56 Revisi 57 Revisi 58 Revisi 59 Revisi 60 Revisi 61 Revisi 62 Revisi 63 Revisi 64 Revisi 65 Revisi 66 Revisi 67 Revisi 68 Revisi 69 Revisi 70 Revisi 71 Revisi 72 Revisi 73 Revisi 74 Revisi 75 Revisi 76 Revisi 77 Revisi 78 Revisi 79 Revisi 80 Revisi 81 Revisi 82 Revisi 83 Revisi 84 Revisi 85 Revisi 86 Revisi 87 Revisi 88 Revisi 89 Revisi 90 Revisi 91 Revisi 92 Revisi 93 Revisi 94 Revisi 95 Revisi 96 Revisi 97 Revisi 98 Revisi 99 Revisi 100

3.3 Strategi

Strategi adalah cara, rencana dan prosedur untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan cara metode perhitungan antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, strategi, sasarannya, waktu, ruang, tenaga dan anggaran. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi akan membuat masyarakat pemerintah dan-nah yang lebih disiplin dan struktural dalam strategi sebagai untuk mencapai tujuan. Sehingga strategi bisa dapat diartikan dari sebuah proses penyusunan rencana, dan karena itu strategi menjadi bagian dari proses penyusunan rencana strategi yang efektif.

Menurut WAPRO Kabupaten Kota Korupsi 2019 - 2020 sebagai pembangunan periode 1 (2019-2024). Maka tahap pertama periode jangka panjang, memiliki tema pembangunan "Pemerintah Kota Korupsi Transformatif Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan", dengan arah kebijakan sebagai berikut yang sesuai dengan arah dan ketahanan pangan dan pertanian adalah "Transformasi ekonomi daerah dengan arah kebijakan,





Pengembangan ekonomi unggulan daerah untuk meningkatkan kapasitas UMKM berbasis tenaga kerja yang berkualitas.

Pemertua strategi pembangunan pertanahan Kabupaten Serang di rumsah berdasarkan misi yang terkandung dalam RPJMD Kabupaten Serang 2025 -2029 yaitu "Meningkatkan Perolehanan Serbahu Kemandirian dan Keunggulan Daerah Yang Berkeadilan Lingkungan".

Aras kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi masalah strategis daerah yang dilaksanakan secara berstep sebagai pelaksanaan strategi. Aras kebijakan merupakan pengelompokan dari strategi pembangunan daerah yang dilaksanakan pada periode-periode pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan.

Pertanyaan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang tahun 2025-2029, pada di rumuskan strategi dan aras kebijakan pembangunan daerah. Pemertua strategi dan aras kebijakan tersebut di jelaskan sebagai jawaban dari permasalahan program prioritas yang akan di lakukan setiap periode untuk lima tahun yang akan datang.

3.4 Aras Kebijakan

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran terpuente Kabupaten Serang, dirumuskan aras kebijakan sebagai 5 (lima) aras kebijakan. Aras kebijakan ini akan memberikan pengaruh dan perhatian Kabupaten Serang memperhatikan tugas dan fungsi sebagai pemerintah daerah dalam urusan pangan dan pertanian.

Untuk mendapatkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Serang dan Perencanaan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 maka dirumuskan aras kebijakan sebagaimana tabel berikut :





Tabel 5.4.1 Aksi Kebijakan Pengembangan Kapasitas Manusia Berdasarkan
RPJMD tahun 2008 - 2009

No.	Tugas/kegiatan 2008	Indikator Kinerja		Monev/evaluasi
		2008	2009	
1	Pengembangan Peningkatan Kapasitas dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebijakan dan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan	Peningkatan Mutu sistem pelayanan sistem pelayanan dan jalinan	01. Peningkatan akses dan pemerataan sistem pelayanan (pelayanan) 02. Peningkatan kompetensi dan tingkat pemerintah daerah	

berpacu kepada sasaran dan strategi dasar, maka struktur kebijakan organisasi yang merupakan cara mencapai sasaran dan strategi tersebut akan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian, perikanan, dan peternakan.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.





IV.

PROGRAM STRATEGI, SUB STRATEGI DAN KONSEP PENYELINGGAHAN RISIKO

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional selama lima tahun (2024-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikator. Program ini merupakan pelaksanaan dan kebijakan strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2022-2029.

4.1 Program

Dalam upaya mewujudkan misi ke-1 (satu) tersebut, didukung dengan 1 (satu) program penunjang, 4 (empat) program urusan pangan, dan 5 (lima) program urusan pertanian, berikut program - program yang ditetapkan tahun 2024 - 2029 :

- 1). Program pengalokasian sumber daya ekonomi untuk ketahanan dan kemandirian pangan;
- 2). Program peningkatan diversifikasi dan kemandirian pangan masyarakat;
- 3). Program penguatan ketahanan pangan;
- 4). Program penguatan keamanan pangan;
- 5). Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
- 6). Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
- 7). Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat ternak;
- 8). Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- 9). Program penyuluhan pertanian;
- 10). Program Peningkat Urusan Pemertanian Daerah Kabupaten, Kota.

Terdapat dalam matriks rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan Ciri-ciri Kemandirian Pangan Dan Pertanian Kabupaten Natuna. Selain program dan kegiatan yang dipilih sesuai dengan isu strategi, tujuan, sasaran, indikator dan perencanaan yang strategis baik target urusan pangan dan pertanian.



Selain itu program dan kegiatan harus terukur dengan menggunakan indikator kuantitatif (jumlah, persentase, capaian, indeks, rasio dll) dan selaras dengan RPJMD, Rencana K/L dan Standar pelayanan. Berikut data sektoral terkait terkait pelaksanaan program prioritas pada pelaksanaan tahun 2023 - 2025:

Tabel 4.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Pangan Persejahtera Kabupaten Natuna tahun 2020-2024.

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan pangan utama	kg/kep/th	24,31	24,36	24,32	24,27	24,31

Capaian utama pembangunan ketahanan pangan dapat diukur dengan indikator ketersediaan pangan utama. Ketersediaan Pangan merupakan rasio rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama (beras) per hektar (kg/berdairi/ha) dan pengolahan Pangan Dalam bilangan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2024 ketersediaan pangan utama Kabupaten Natuna mencapai 24.31 kg/kep/th. Berdasarkan pengolahan aplikasi sumber bahan makanan peternakan tersebut dikawatirkan adanya keberagaman pada pola konsumsi masyarakat.

Tabel 4.1.2. Perkembangan Rasio Rata Ketersediaan energi dan protein Kabupaten Natuna Tahun 2020 - 2024

Tahun	Energi (Kkal/Kg)		Protein (g/Kg)	
	2020	2021	2022	2023
2020	2.131	2.12.01	20.10	20.08
2021	2.129	2.12.11	20.08	20.07
2022	2.128	2.12.21	20.07	20.07
2023	2.128	2.12.21	20.04	20.06
2024	2.127	2.12.21	20.03	20.07

Dari hasil data dapat dilihat bahwa total energi, protein dan lemak untuk wilayah Kabupaten Natuna dari tahun 2020 sampai tahun 2024, dimana hasil menunjukkan bahwa bahwa Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sudah diatas AKE 2400 kkal/kep/hari dan AKP diatas 60 gram/kep/hari.





Table 6.1.3. Data Anggaran Penger Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023-2024

Kode	Kategori	Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Perubahan (Rp)	Saldo Akhir Perbandingan dengan Anggaran		Saldo (Rp)			Saldo Awal (Rp)
					2023	2024	2023	2024	2023	
4000	11.00	-	11.700	11.700	-	11.700	-	-	-	-
		11.000	11.000	11.000	-	1.000	-	-	-	-
		9.000	9.000	9.000	-	0	-	-	-	9.000
2000	5.00	0.000	0.000	0.000	0	0.000	-	-	-	0.000
2000	9.00	-	9.000	9.000	-	0	-	-	-	0.000
4000	10.00	0.000	0.000	-	-	0.000	-	-	-	0.000
4000		0.000.00	0.000	0	0	0.000	-	0.000	-	0.000.00

Kegiatan Cadangan pangan Pemerintah (CFF) merupakan kegiatan pengadaan dan penyediaan bahan-bahan pangan pokok berupa beras kepada masyarakat secara gratis melalui transaksi sebagai kredit. Di tahun 2024, pemerintah daerah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tidak dapat melaksanakan pengadaan beras CFF dikarenakan adanya anggaran sehingga tidak beras CFF yang berada di gudang Bulog atas pengadaan dan penyediaan tahun 2023 sebanyak 4.319,89 kg, kemudian diturunkan kepada pemerintah daerah sebanyak 52 KK. 136 (juga dengan total penyediaan beras CFF 2.472 kg, sehingga pada akhir tahun 2024 tidak beras CFF sebanyak 1.530,52 kg.

Selain pelaksanaan pencapaian indikator kinerja pemerintah, kinerja pemerintah lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi utama serta tahun terdahulu terdapat paragraf di bawah ini sebagai berikut :





a. Pendanaan mengenai Lusi Tanaman, Lusi Papan, tanaman dan produk Pangan dan hortikultura.

Tabel 4.1.4. Lusi Lebih Besar Berdasarkan MD Besar Kategori Petakan Tahun 2015, 2016, 2017

No.	Deskripsi	Tahun Pertama Lusi Besar	Contribution Besar Petakan	Tahun Kedua Besar Petakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MD Besar	114,83	600,00	114,83
2.	MD Besar Pengal	81,48	40,00	81,48
3.	MD Besar Tanaman	2,79	2,79	0
4.	MD Besar Produk	181,6	80,00	80,00
5.	MD Besar Lusi	188,47	188,47	0
6.	MD Lusi	1121	1121	0
	Total	1869,17	811,26	866,31

Tabel 4.1.5. Produksi Tanaman Pangan Tahun 2011 - 2014

No	Kategori	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tea	229,71	21,33	21,33	113,33
2.	Jahe	589,56	89,16	919,33	899,66
3.	Daun Bawang	181,71	187,33	177,33	879,67
4.	Daun Jeruk	179,03	189,33	179,33	189,33
5.	Daun				
6.	Daun Tomat	87,33	18,33	87,33	87,33
7.	Total	1.268,30	1.296,01	1.265,32	1.810,32





Tabel 4.1.8. Data Tenaga, Pemasukan Penuh Masa dan Penuh Masa Paruh Masa (RM) Tahun 2021-2024

No	Kategori	2021		2022		2023		2024	
		Orang	Penuh Masa						
1.	Manusia Baru	1,05	5,75	2,05	7,75	1,05	5,05	2,05	1,05
2.	Manusia Keluar	0,05	0,05	-	0,05	-	0,05	0,05	0,05
3.	Salah	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-
4.	Manusia Baru	10,75	17,05	2,05	17,05	10,75	10,05	10,75	10,75
5.	Salah	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-
6.	Manusia	10,75	17,05	2,05	17,05	10,75	10,05	10,75	10,75
7.	Manusia	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8.	Manusia Baru	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
9.	Manusia Keluar	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
10.	Salah	0,10	0,1	0,1	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
11.	Manusia Baru	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
12.	Manusia Keluar	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
13.	Salah	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
14.	Manusia Baru	10,75	17,05	2,05	17,05	10,75	10,05	10,75	10,75
15.	Salah	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-
16.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
17.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
18.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
19.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
20.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
21.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
22.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
23.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
24.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
25.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
26.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
27.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
28.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
29.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
30.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
31.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
32.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
33.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
34.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
35.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
36.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
37.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
38.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
39.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
40.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
41.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
42.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
43.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
44.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
45.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
46.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
47.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
48.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
49.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
50.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
51.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
52.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
53.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
54.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
55.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
56.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
57.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
58.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
59.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
60.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
61.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
62.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
63.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
64.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
65.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
66.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
67.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
68.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
69.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
70.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
71.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
72.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
73.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
74.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
75.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
76.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
77.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
78.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
79.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
80.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
81.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
82.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
83.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
84.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
85.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
86.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
87.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
88.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
89.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
90.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
91.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
92.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
93.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
94.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
95.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
96.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
97.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80
98.	Manusia	0,10	0,1	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
99.	Manusia	0,10	0,1	0,10	-	-	-	-	-
100.	Manusia	10,80	18,1	2,10	18,1	10,80	10,1	10,80	10,80




Tabel 4.1.7. Populasi ternak besar tahun 2020-2024

No	Kategori Ternak	JUMLAH POPULASI TERNAK (SEKAW)				
		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sapi	12.014	17.199	24.095	31.199	38.199
2.	Peranakan	1.993	1.811	1.817	1.711	1.699
3.	Sapi Peranakan	100.793	91.199	1.000.000	11.000.000	100.000.000
4.	Sapi Batak	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Tabel 4.1.8. Produksi Ternak Tahun 2020-2024

No	Kategori Ternak	PRODUKSI TERNAK (TOLONG)				
		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sapi	10.0	10.0	10.1	10.2	10.3
2.	Peranakan	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.	Sapi Peranakan	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4.	Sapi Batak	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
5.	Telur (Ternak Peranakan)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6.	Telur (Sapi Peranakan)	10	10	10	10	10.0

Tabel 4.1.9. Penjualan Ternak Tahun 2020-2024

No	Kategori Ternak	JUMLAH PENJUALAN TERNAK (SEKAW)				
		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sapi	-	1.011	1.000	1.000	1.000
2.	Peranakan	-	10	10	10	10
3.	Sapi Peranakan	-	-	-	100.000	100.000
4.	Sapi Batak	-	-	-	10.000	1.000


Tabel 4.1.10. Pemantauan Nawa Qurbang Tahun 2020-2024

No	Kategori Nawa	Jumlah Individu/Populasi (Indiv)				
		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bay		70	100	100	100
2.	Penyakit		0	10	10	10

Tabel 4.1.11. Pelayanan Kesehatan Manusia / Ternak (Eko) Tahun 2021-2024

No	Spesies/Usia Ternak	Jumlah Sapi (Tahun 2021-2024) (Indiv/Populasi (Indiv))			
		Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Bay	1000	1000	1000	1000
2.	Penyakit	0	0	0	0
3.	Manusia	100	100	100	100
Jumlah		1000	1000	1000	1000

Tabel 4.1.12. Pengendalian Penyakit Asal Manusia Tahun 2020-2024

No	Jenis Bak	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Indiv/Populasi (Indiv)			Indiv/Populasi (Indiv)			Indiv/Populasi (Indiv)			Indiv/Populasi (Indiv)		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1.	Penyakit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Manusia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Manusia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Manusia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Manusia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabel 4.1.13. Probabilitas Transmisi Penyakit (Ternak) Tahun 2020-2024

No	Kategori	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	Penyakit	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Manusia	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Manusia	0,000	0,000	0,000	0,000
Jumlah (Indiv)		0,000	0,000	0,000	0,000



4.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program pengabdian kepada masyarakat (PKM) (KAWASAN BUDIDAYA PERIKANAN)
 1. Perencanaan Infrastruktur dan Sektoral Pendukung Kemandirian Pangan serta Kemandirian Daerah Kabupaten, Kota
 1. Koordinasi dan Sinergisasi Penyusunan Infrastruktur Logistik
2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
 1. Kegiatan Penyuluhan dan Penyuluhan Pangan Pokok atau Pangan Lokal serta Sogok Ketahanan Daerah Kabupaten, Kota dalam rangka Stabilitas Pangan dan Harga Pangan
 1. Sub Kegiatan Pengembangan Kemandirian Distribusi Pangan Kabupaten, Kota
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produksi dan Konsumsi Wilayah Kabupaten, Kota
 2. Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Dukungan Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
 3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Komsumsi Pangan Perkapita, Tahun serta Sogok Angga Ketahanan Diri
 1. Sub Kegiatan Pemantauan dan Pencapaian Target Komsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
 4. Kegiatan Penyuluhan dan Penyuluhan Pangan Pokok atau Pangan Lokal serta Sogok Ketahanan Daerah Kabupaten, Kota dalam rangka Stabilitas Pangan dan Harga Pangan
 1. Sub Kegiatan Penyuluhan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 2. Sub Kegiatan Pengembangan Kemandirian Usaha Pangan Liris/risiko dan Tidak Terdiliris/risiko
 3. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pangan Keluaran
 5. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Komsumsi Pangan Perkapita, Tahun serta Sogok Angga Ketahanan Diri
 1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan/produksi Komsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal



3. Program peningkatan ketahanan pangan:

1. Kegiatan Penyelidikan Pola Konsumsi dan Ketersediaan Pangan Masyarakat
 1. Sub Kegiatan Penyelidikan, Penanggulangan dan Analisis Pola Konsumsi dan Ketersediaan Pangan
2. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat Kabupaten Kota
 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Program Kewaspadaan Pangan dan Gizi
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kawasan Pangan yang Berisiko GIZI 1 (RIS) Daerah Kabupaten Kota
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinergisasi Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Gizi Kabupaten Kota

4. Program peningkatan ketahanan pangan:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengamatan Ketahanan Pangan Segar Daerah Kabupaten Kota
 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pangan Segar Asli Tambahan Daerah Kabupaten / Kota
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pangan Segar Asli Tambahan Daerah Kabupaten / Kota
 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian ketahanan pangan segar asli tambahan
 4. Sub Kegiatan Penyelidikan Status Pangan Berbasis ORG (RIS) pangan segar asli tambahan Daerah Kabupaten Kota
 5. Sub Kegiatan Pengukuran kelembagaan pangan kesehatan dan mutu pangan segar asli tambahan

5. Program penyediaan dan pengembangan sumber perikanan:

1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tanaman, dan Mikro Organisme Kawasan Kabupaten Kota
 1. Sub Kegiatan Pemeliharaan SDG Hewan/Tanaman
 2. Sub Kegiatan Pemetaan Ketersediaan dan Ketersanan SDG Tanaman
 3. Sub Kegiatan Pengujian Kualitas SDG Hewan / Tanaman
2. Kegiatan Penyelidikan Benih/Bibit Teknik dan Hijauan Pakan Teknik yang Berbasis data 1 (RIS) Daerah Kabupaten Kota Lain
 1. Sub Kegiatan Pengujian Kualitas SDG Hewan / Tanaman



2. Sub Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pokok Ternak yang Dauswarga dan Daerah Kabupaten / Kota Lain
8. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Sektor Pertanian
1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Sederhana Bersifat Perkebunan Gedecehid Gering
 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Sederhana Bersifat Hortikultura Bersifat Ulah
 3. Sub Kegiatan Pengabdian Masyarakat Sektor Perikanan Perikanan Sosial dengan Komunitas, Ternak/ dan Specific Lokal
 4. Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengabdian Sektor Perikanan Perikanan
9. Program penelitian dan pengabdian masyarakat pertanian
1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pertanian
 1. Sub Kegiatan Pengabdian Laboratorium Pangan Berkelanjutan, LPM, Kematan Pertanian Sektor Berkelanjutan, KPR dan Laboratorium Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCPB di Kabupaten / Kota
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Praktek Penjualan Pertanian Labaya
 3. Sub Kegiatan Pengabdian Aktif dan Pengabdian Masyarakat Sektor Kawasan Pertanian
 4. Sub Kegiatan Pengabdian dan Pemasaran Kawasan Pertanian
 2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pertanian
 1. Sub Kegiatan Pengabdian, Relasi dan Pemeliharaan Sederhanan of Kawasan serta Sektor Pengabdian
 2. Sub Kegiatan Pengabdian, Relasi dan Pemeliharaan Jasa Jasa Ternak
 3. Sub Kegiatan Relasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Ternak
10. Program penelitian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat peternakan
1. Kegiatan Pengabdian Kesehatan Hewan, Peternakan dan Perikanan Daerah Wilayah Persebaran Hewan Hewan Dalam daerah Kabupaten, Kota
 1. Sub Kegiatan Pengabdian Kesehatan Hewan dan Perikanan pada Hewan



6. Program pendidikan dan pengajaran/binaan khusus pertanian:
1. Kegiatan Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat Pertanian Eksternal/Non
 1. Sub Kegiatan Pengabdian Organisasi Pengusaha Tambakan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan
7. Program penelitian pertanian
1. Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Pertanian
 1. Sub Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Petani di Kecamatan dan Desa
 2. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten, Kota
 3. Sub Kegiatan Penelitian dan Penulisan/Diseminasi Hasil Penelitian Penelitian Pertanian
 4. Sub Kegiatan Penelitian Kapasitas Kelembagaan Penelitian di Kecamatan dan Desa
10. Program Peningkat Kualitas Pesisir/Deasar Eksternal/Non:
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Peningkat Deasar
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gap dan Pengawasan ASB
 2. Kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Peningkat Deasar
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja MPO
 3. Kegiatan Administrasi Kapasitas Peningkat Deasar
 1. Sub Kegiatan Penelitian dan Penelitian Pagarasi Berdasarkan Tanya dan Tanya
 4. Kegiatan Administrasi Kapasitas Peningkat Deasar
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Mutu
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Rumah Tangga
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Ruang DOKUMEN dan Pengabdian
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Bohem, Bohemid
 5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi MPO
 6. Kegiatan Wujudkan Ruang Hutan Peningkat Inisiasi Pesisir/Deasar
 1. Sub Kegiatan Pengabdian Kelembagaan Dinas Operasional dan Lapangan



6. Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Penunjang Usaha Pemeliharaan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan
 2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Instalasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Sarung Bina Daerah Penunjang Usaha Pemeliharaan Daerah
 1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Perakam dan Mesin Lainnya
 2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Servis Pemeliharaan, Pelecatan dan Perbaikan Kendaraan (Jenis Operasional dan Lapangan)
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain
 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rangkaian kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenakan Pagar dan Pertanian dalam lima tahun mendatang. Berikut teknis penjabaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dinas Ketenakan Pagar dan Pertanian Kabupaten Situbone adalah sebagaimana tabel 4.3.1 berikut :



Tabel 4.2.3. Indikator Kinerja Utama IKU

No	Indikator	Satuan	Tahun Pelajaran						No
			2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	
1	Penelitian dan Inovasi Pengajaran	Penyebar	100	100	100	100	100	100	100
2	Kelembagaan	Penyebar	11.000	11.700	12.000	12.800	13.000	13.200	140
4	Nilai Akademik Mahasiswa	Nilai	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	Penelitian
5	Indeks Penyebaran Fasilitas Akademik	Indeks	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Penelitian

Tabel 4.2.4. Operasional dan Pemantauan Peningkatan IKU IKU

No	Indikator	Strategi Indikator	Indikator Operasional	Indikator Pemantauan	Indikator
1.4	Penelitian dan Inovasi Pengajaran	Penelitian dan Inovasi Pengajaran	Indikator penelitian yang menghasilkan karya ilmiah yang dapat diterapkan di lingkungan perguruan tinggi	Indikator penelitian yang menghasilkan karya ilmiah yang dapat diterapkan di lingkungan perguruan tinggi	Indikator penelitian yang menghasilkan karya ilmiah yang dapat diterapkan di lingkungan perguruan tinggi
1.8	Kelembagaan	Kelembagaan	Indikator kelembagaan yang menghasilkan karya ilmiah yang dapat diterapkan di lingkungan perguruan tinggi	Indikator kelembagaan yang menghasilkan karya ilmiah yang dapat diterapkan di lingkungan perguruan tinggi	Indikator kelembagaan yang menghasilkan karya ilmiah yang dapat diterapkan di lingkungan perguruan tinggi





Tabel 4.2.5. Tabela Merencanakan Tujuan dan Sasaran Rencana PD

Kategori Rencana (Kategori) (Kategori)	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tipe Risiko						Aksi	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Meningkatkan Kapasitas Talent Human Capital	Meningkatkan produktivitas sistem produksi dan kelembagaan dengan melalui sisi kelembagaan melalui sisi sumber daya kelembagaan yang akan gigit		Indeks Kelembagaan Sistem								
			Meningkatkan Produktivitas Kerja Energi Daerah (Kerja Kelembagaan)	Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	100	100	100	100	100	100	100
			Meningkatkan Produktivitas Kerja Kelembagaan (Kerja Kelembagaan)	Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Meningkatkan Produktivitas Kerja Kelembagaan (Kerja Kelembagaan)	Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Kabupaten Tahun 2018 - 2020, program dan kegiatan dilaksanakan sebagai program, kegiatan tingkat SKPD, program, kegiatan tingkat SKPD dan program, kegiatan, kampanye. Program/kegiatan (Kategori) SKPD adalah dilaksanakan rencana kerja untuk SKPD, program tingkat SKPD adalah dilaksanakan rencana kerja beberapa SKPD, sedangkan program kampanye dan data: rencana adalah dilaksanakan rencana kerja terpadu oleh pemerintah/wilayah dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah daerah, atau lainnya. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, konkret dan terpadu yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tahun 2018 dengan tujuan jangka panjang untuk meningkatkan gizi masyarakat, kualitas dan sumber yang dilibatkan.

Adapun untuk rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikator Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tahun 2018 -2020 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Question	Answer
1. A number is 15 less than another number. The sum of the two numbers is 105. Find the numbers.	Let the first number be x and the second number be y . $x = y - 15$ $x + y = 105$ $(y - 15) + y = 105$ $2y - 15 = 105$ $2y = 105 + 15$ $2y = 120$ $y = \frac{120}{2}$ $y = 60$ $x = y - 15$ $x = 60 - 15$ $x = 45$ The numbers are 45 and 60.
2. The sum of three consecutive integers is 120. Find the integers.	Let the first integer be x , the second integer be $x + 1$, and the third integer be $x + 2$. $x + (x + 1) + (x + 2) = 120$ $3x + 3 = 120$ $3x = 120 - 3$ $3x = 117$ $x = \frac{117}{3}$ $x = 39$ The integers are 39, 40, and 41.
3. A number is 20 more than another number. The difference between the two numbers is 40. Find the numbers.	Let the first number be x and the second number be y . $x = y + 20$ $x - y = 40$ $(y + 20) - y = 40$ $20 = 40$ This is a contradiction. There are no such numbers.
4. The sum of two numbers is 100. One number is 20 more than the other. Find the numbers.	Let the first number be x and the second number be y . $x + y = 100$ $x = y + 20$ $(y + 20) + y = 100$ $2y + 20 = 100$ $2y = 100 - 20$ $2y = 80$ $y = \frac{80}{2}$ $y = 40$ $x = y + 20$ $x = 40 + 20$ $x = 60$ The numbers are 60 and 40.
5. The sum of three consecutive even integers is 180. Find the integers.	Let the first even integer be x , the second even integer be $x + 2$, and the third even integer be $x + 4$. $x + (x + 2) + (x + 4) = 180$ $3x + 6 = 180$ $3x = 180 - 6$ $3x = 174$ $x = \frac{174}{3}$ $x = 58$ The integers are 58, 60, and 62.

Bibliography



Author	Year	Title	Journal	Volume	Page
Smith, J.	2010	The Impact of...	Journal of...	15	201-215
Johnson, A.	2008	Analysis of...	Research in...	22	105-120
Brown, M.	2012	Exploring...	International...	18	300-315
Davis, K.	2009	A Study on...	Journal of...	20	45-60
Wilson, L.	2011	Investigating...	Journal of...	17	150-165
Taylor, R.	2007	The Role of...	Journal of...	14	78-93

Question	Answer	Mark
1. A number is multiplied by 3 and then 5 is added to the result. The final result is 14. What is the original number?	Let the original number be x . $3x + 5 = 14$ $3x = 14 - 5$ $3x = 9$ $x = \frac{9}{3}$ $x = 3$	3
2. A rectangle has a length of 12 cm and a width of 8 cm. What is its perimeter?	Perimeter = $2 \times (\text{length} + \text{width})$ $2 \times (12 + 8)$ 2×20 40 cm	3
3. A number is divided by 4 and then 2 is subtracted from the result. The final result is 3. What is the original number?	Let the original number be x . $\frac{x}{4} - 2 = 3$ $\frac{x}{4} = 3 + 2$ $\frac{x}{4} = 5$ $x = 5 \times 4$ $x = 20$	3
4. A number is multiplied by 5 and then 10 is added to the result. The final result is 35. What is the original number?	Let the original number be x . $5x + 10 = 35$ $5x = 35 - 10$ $5x = 25$ $x = \frac{25}{5}$ $x = 5$	3
5. A rectangle has a length of 15 cm and a width of 10 cm. What is its area?	Area = $\text{length} \times \text{width}$ 15×10 150 cm ²	3
6. A number is divided by 6 and then 3 is subtracted from the result. The final result is 1. What is the original number?	Let the original number be x . $\frac{x}{6} - 3 = 1$ $\frac{x}{6} = 1 + 3$ $\frac{x}{6} = 4$ $x = 4 \times 6$ $x = 24$	3
7. A number is multiplied by 7 and then 14 is added to the result. The final result is 49. What is the original number?	Let the original number be x . $7x + 14 = 49$ $7x = 49 - 14$ $7x = 35$ $x = \frac{35}{7}$ $x = 5$	3
8. A rectangle has a length of 18 cm and a width of 12 cm. What is its perimeter?	Perimeter = $2 \times (\text{length} + \text{width})$ $2 \times (18 + 12)$ 2×30 60 cm	3
9. A number is divided by 8 and then 4 is subtracted from the result. The final result is 2. What is the original number?	Let the original number be x . $\frac{x}{8} - 4 = 2$ $\frac{x}{8} = 2 + 4$ $\frac{x}{8} = 6$ $x = 6 \times 8$ $x = 48$	3
10. A number is multiplied by 9 and then 18 is added to the result. The final result is 63. What is the original number?	Let the original number be x . $9x + 18 = 63$ $9x = 63 - 18$ $9x = 45$ $x = \frac{45}{9}$ $x = 5$	3

Account Name		Date		Description		Debit		Credit	
No.		Month	Day						
1	1000								
2	1000								
3	1000								
4	1000								
5	1000								
6	1000								
7	1000								
8	1000								
9	1000								
10	1000								
11	1000								
12	1000								
13	1000								
14	1000								
15	1000								
16	1000								
17	1000								
18	1000								
19	1000								
20	1000								
21	1000								
22	1000								
23	1000								
24	1000								
25	1000								
26	1000								
27	1000								
28	1000								
29	1000								
30	1000								
31	1000								
32	1000								
33	1000								
34	1000								
35	1000								
36	1000								
37	1000								
38	1000								
39	1000								
40	1000								
41	1000								
42	1000								
43	1000								
44	1000								
45	1000								
46	1000								
47	1000								
48	1000								
49	1000								
50	1000								
51	1000								
52	1000								
53	1000								
54	1000								
55	1000								
56	1000								
57	1000								
58	1000								
59	1000								
60	1000								
61	1000								
62	1000								
63	1000								
64	1000								
65	1000								
66	1000								
67	1000								
68	1000								
69	1000								
70	1000								
71	1000								
72	1000								
73	1000								
74	1000								
75	1000								
76	1000								
77	1000								
78	1000								
79	1000								
80	1000								
81	1000								
82	1000								
83	1000								
84	1000								
85	1000								
86	1000								
87	1000								
88	1000								
89	1000								
90	1000								
91	1000								
92	1000								
93	1000								
94	1000								
95	1000								
96	1000								
97	1000								
98	1000								
99	1000								
100	1000								

Account Name	Debit	Credit
Accounts Payable		100
Accounts Receivable	100	
Inventory		100
Prepaid Insurance		100
Property, Plant, and Equipment		100
Accumulated Depreciation		100
Retained Earnings		100
Common Stock		100
Dividends	100	
Revenue		100
Cost of Sales	100	
Expenses	100	
Income Tax Expense	100	
Net Income		100
Retained Earnings (Closing)		100



Year	Mathematics	Science	Language Arts	History	Physical Education	Art	Music	Health	Foreign Languages	Electives
2010	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2011	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2013	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2014	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2015	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2016	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2017	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2018	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2019	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2021	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2022	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2024	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2025	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2026	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2027	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2028	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2029	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2030	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Mathematics

Mathematics

Account Name	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	1/31	
Accounts Payable																																	
Accounts Receivable																																	
Inventory																																	
Prepaid Insurance																																	
Property, Plant, & Equipment																																	
Accumulated Depreciation																																	
Notes Payable																																	
Long-Term Debt																																	
Equity																																	
Retained Earnings																																	

1/1/2025

1/31/2025

1/1/2025

1/31/2025

Question	Answer
1. A number is 10 less than another number. The sum of the two numbers is 50. Find the numbers.	Let the first number be x and the second number be y . $x = y - 10$ $x + y = 50$ $(y - 10) + y = 50$ $2y - 10 = 50$ $2y = 60$ $y = 30$ $x = 30 - 10 = 20$ The numbers are 20 and 30.
2. A number is 5 more than another number. The difference between the two numbers is 10. Find the numbers.	Let the first number be x and the second number be y . $x = y + 5$ $x - y = 10$ $(y + 5) - y = 10$ $5 = 10$ This is a contradiction. There are no such numbers.
3. A number is 15 more than another number. The sum of the two numbers is 70. Find the numbers.	Let the first number be x and the second number be y . $x = y + 15$ $x + y = 70$ $(y + 15) + y = 70$ $2y + 15 = 70$ $2y = 55$ $y = 27.5$ $x = 27.5 + 15 = 42.5$ The numbers are 27.5 and 42.5.
4. A number is 8 less than another number. The difference between the two numbers is 15. Find the numbers.	Let the first number be x and the second number be y . $x = y - 8$ $x - y = 15$ $(y - 8) - y = 15$ $-8 = 15$ This is a contradiction. There are no such numbers.
5. A number is 12 more than another number. The sum of the two numbers is 80. Find the numbers.	Let the first number be x and the second number be y . $x = y + 12$ $x + y = 80$ $(y + 12) + y = 80$ $2y + 12 = 80$ $2y = 68$ $y = 34$ $x = 34 + 12 = 46$ The numbers are 34 and 46.

Table 1: Summary of the model structure and parameters.

Table 1

Component	Structure	Parameters	Initial Values	Constraints
State Space	$\mathcal{S} = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$	n	-	-
Action Space	$\mathcal{A} = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$	m	-	-
Transition Function	$P(s' s, a)$	$n \times m \times n$	-	$\sum_{s'} P(s' s, a) = 1$
Reward Function	$R(s, a)$	$n \times m$	-	-
Discount Factor	γ	Scalar	0.9	$0 < \gamma < 1$
Learning Rate	α	Scalar	0.01	$0 < \alpha < 1$
Policy Function	$\pi(a s)$	$n \times m$	-	$\sum_a \pi(a s) = 1$
Value Function	$V(s)$	n	-	-
Q-Function	$Q(s, a)$	$n \times m$	-	-
Optimization Algorithm	Q-Learning	-	-	-
Convergence Criterion	Max Error	-	0.001	-
Simulation Length	Episodes	-	1000	-
Simulation Length	Steps/Episode	-	100	-
Simulation Length	Time/Step	-	0.01	-

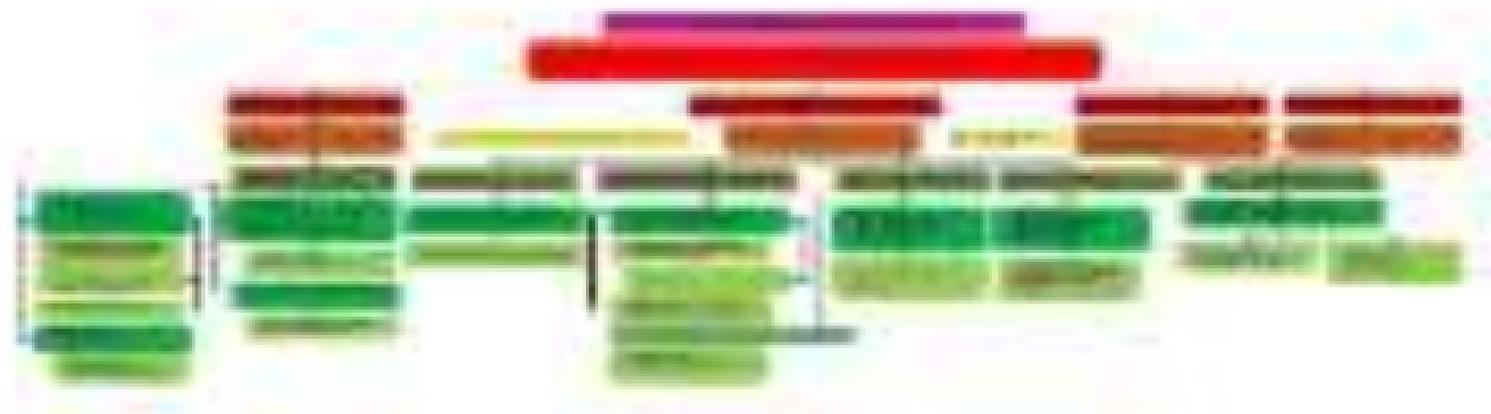
Table 1: Summary of the model structure and parameters. The table lists various components of the model, their mathematical representations, and associated parameters and constraints.

Account Name	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12
Accounts Payable	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Accounts Receivable	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Inventory	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Prepaid Insurance	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Property, Plant, & Equipment	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Accumulated Depreciation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accounts Payable	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Accounts Receivable	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Inventory	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Prepaid Insurance	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Property, Plant, & Equipment	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Accumulated Depreciation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accounts Payable	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Accounts Receivable	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Inventory	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Prepaid Insurance	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Property, Plant, & Equipment	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Accumulated Depreciation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Account Name	Debit	Credit
Accounts Payable		100
Accounts Receivable	100	
Inventory		100
Prepaid Insurance		100
Property, Plant, and Equipment		100
Accumulated Depreciation		100
Retained Earnings		100
Common Stock		100
Dividends	100	
Revenue		100
Cost of Sales	100	
Salaries Expense	100	
Interest Expense	100	
Income Tax Expense	100	
Other Expenses	100	

Country	Year	Sample size	Method	Findings
USA	2000	1000	Survey	...
USA	2001	1000	Survey	...
USA	2002	1000	Survey	...
USA	2003	1000	Survey	...
USA	2004	1000	Survey	...
USA	2005	1000	Survey	...
USA	2006	1000	Survey	...
USA	2007	1000	Survey	...
USA	2008	1000	Survey	...
USA	2009	1000	Survey	...
USA	2010	1000	Survey	...
USA	2011	1000	Survey	...
USA	2012	1000	Survey	...
USA	2013	1000	Survey	...
USA	2014	1000	Survey	...
USA	2015	1000	Survey	...
USA	2016	1000	Survey	...
USA	2017	1000	Survey	...
USA	2018	1000	Survey	...
USA	2019	1000	Survey	...
USA	2020	1000	Survey	...

Table 8. Examining the relationship between financial performance and the factors listed (2000–2020)







4.3 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap Unit Kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada Bidang-Bidang keorganisasian yang ditanggungjawab oleh unit organisasi perangkat Daerah Selain bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing Daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Pengeri Kabupaten Nature yang mengacu pada Cujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam fokus layanan urusan perundang dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Cujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga bertepatan dengan aksi kebijakan dan kebijakan umum dalam RKPD Kabupaten Nature yang ditetapkan secara khusus kepada Dinas Kesehatan Pengeri Kabupaten Nature terdapat pada tabel berikut.

Tabel 4.3.1. Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Daerah Kabupaten Nature Urusan Pengeri dan Perbatasan Tahun 2025 – 2030

No	Indikator Kinerja	Tahun								
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Urusan Hukum									
1	Menyediakan Kelembagaan yang Mendukung Pelayanan Hukum yang Aman, Berkualitas, dan Berkeadilan	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum yang terjangkau, cepat, dan berkualitas	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Menyediakan Kelembagaan yang Mendukung Pelayanan Hukum yang Aman, Berkualitas, dan Berkeadilan	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum yang terjangkau, cepat, dan berkualitas	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum yang terjangkau, cepat, dan berkualitas	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum yang terjangkau, cepat, dan berkualitas	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum yang terjangkau, cepat, dan berkualitas	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum yang terjangkau, cepat, dan berkualitas	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum yang terjangkau, cepat, dan berkualitas	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum yang terjangkau, cepat, dan berkualitas	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum yang terjangkau, cepat, dan berkualitas	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum yang terjangkau, cepat, dan berkualitas	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum yang terjangkau, cepat, dan berkualitas	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum yang terjangkau, cepat, dan berkualitas	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum yang terjangkau, cepat, dan berkualitas	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum yang terjangkau, cepat, dan berkualitas	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum yang terjangkau, cepat, dan berkualitas	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum yang terjangkau, cepat, dan berkualitas	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum yang terjangkau, cepat, dan berkualitas	100%	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Peningkatan Pelayanan dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum yang terjangkau, cepat, dan berkualitas	100%	100	100	100	100	100	100	100	100



V.

PERUTUP

Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunuk 2025-2029 merupakan perjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunuk untuk 5 (lima) tahun mendatang dan menjadi RPJMD Kabupaten Nunuk Tahun 2025-2029.

Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunuk tahun anggaran 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan menjadi dokumen perencanaan tahunan. Pelaksanaan Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, karena akan melibatkan keterlibatan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan perencanaan aspirasi pembangunan yang memang melibatkan oleh stakeholder sesuai dengan tujuan yang ingin di capai.

Apabila dalam proses pelaksanaan Rencana Tahun 2025-2029 diidentifikasi perlu hal-hal di luar kendali Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunuk, maka konsep strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunuk untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Nunuk, 8 September 2025

**Kapala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Nunuk**

YAN SYACALL SIDI
NIP. 201902100010001000

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pagar Lintang Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5822.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5827. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Eka Nugroho Probowo Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pemerintahan Pembangunan dan Keuangan Daerah Yang diwujudkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126-1730 Tahun 2020.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nalca Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2023-2040 Kabupaten Daerah Kabupaten Nalca Tahun 2024 Nomor 04.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nalca Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran 2025 Kabupaten Daerah Kabupaten Nalca Tahun 2024 Nomor 02.
11. Peraturan Bupati Nalca Nomor 07 Tahun 2024 tentang Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Daerah Kabupaten Nalca Tahun 2024 Bupati Nalca Nomor 07 Tahun 2024 Nomor 340. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nalca Nomor 07 Tahun 2024 tentang Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Daerah Kabupaten Nalca Tahun 2025 Nomor 003.

KEBUTUHAN

Menyusun	
KEGATI	Pembelahan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kehutanan Pangeran Tahur 2025 hingga tahun 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEGUA	Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Pangeran Tahur 2025-2029 sebagaimana Ditunjuk KESATI ditahap awal merupakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Pangeran dan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 b. Menyusun Rencana Strategis Dinas Kehutanan Pangeran dan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dan c. Menyusun Rancangan/Rencana Strategis Dinas Kehutanan Pangeran dan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029
KEHGA	Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kehutanan Pangeran dan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Pangeran dan Pemerintah Kabupaten Natuna.
KEDEPAT	Res. Kasan 19/2024/2024 tentang pengangkatan

Disahkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 9 Januari 2024.

KEPALA DINAS KEHUTANAN PANGRAN
KABUPATEN NATUNA



WARY ETALAKALI, S.P.K.
NIP. 19760807 200021 1 001

UNIVERSITAS
KEPALA DAERAH KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS DASAR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022-2028

TAMBAHAN RENCANA STRATEGIS DASAR KETAHANAN PANGAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022-2028

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	WAN DYADLI, SSM	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	ZURKI, S.Sos	Septemba	Ketua Tim
3.	ARIMU, DUSAY, S.Pi	Kepala Bidang Kemitraan Pertanian	Anggota
4.	ZURHAK, S.H., WM	Kepala Bidang Perikanan	Anggota
5.	ARIZATI, SP	Kepala Bidang Tanaman Pertanian dan Hortikultura	Anggota
6.	SACHRI, S.E.	Kepala Bidang Perikanan Sektor dan Perikanan	Anggota
7.	FUNETA, SE	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
8.	KOLIBUDHYONO, SP, M.Si	Angka Khataman Pertanian MUDA	Anggota
9.	ENDANG PURNAWATI, SP, M.Si	Perwakilan Perempuan MUDA	Anggota
10.	IRANGETHAWAN, S.Pi	Perwakilan ANA MUDA	Anggota

KEPALA DAERAH KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA



WAN DYADLI, SSM
NIP. 181800072800021 001

Wissenschaftliche Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre

1. Aufgabenstellung:
 Die folgenden Aufgabenstellungen sind in der Reihenfolge der Aufgabenstellung zu bearbeiten.
 Die Aufgabenstellungen sind in der Reihenfolge der Aufgabenstellung zu bearbeiten.
 Die Aufgabenstellungen sind in der Reihenfolge der Aufgabenstellung zu bearbeiten.

2. Lösungshinweise:
 Die Aufgabenstellungen sind in der Reihenfolge der Aufgabenstellung zu bearbeiten.
 Die Aufgabenstellungen sind in der Reihenfolge der Aufgabenstellung zu bearbeiten.

Aufgabenstellung	Punkte	Lösung	Bemerkungen
1. Aufgabe	10	[Lösung]	[Bemerkungen]
2. Aufgabe	10	[Lösung]	[Bemerkungen]
3. Aufgabe	10	[Lösung]	[Bemerkungen]
4. Aufgabe	10	[Lösung]	[Bemerkungen]
5. Aufgabe	10	[Lösung]	[Bemerkungen]
6. Aufgabe	10	[Lösung]	[Bemerkungen]
7. Aufgabe	10	[Lösung]	[Bemerkungen]
8. Aufgabe	10	[Lösung]	[Bemerkungen]

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

PLANT INDUSTRY
PLANT INDUSTRY
PLANT INDUSTRY
PLANT INDUSTRY
PLANT INDUSTRY

No.	Name	Quantity	Value	Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PLANT INDUSTRY
PLANT INDUSTRY
PLANT INDUSTRY
PLANT INDUSTRY
PLANT INDUSTRY

一、练习音序

张 刘 王 李 陈 周 吴 郑 孙 赵 钱 孙 李 周 吴 郑 孙 赵 钱

王 李 陈 周 吴 郑 孙 赵 钱 孙 李 周 吴 郑 孙 赵 钱

王 李 陈 周 吴 郑 孙 赵 钱 孙 李 周 吴 郑 孙 赵 钱

王 李 陈 周 吴 郑 孙 赵 钱 孙 李 周 吴 郑 孙 赵 钱

王 李 陈 周 吴 郑 孙 赵 钱 孙 李 周 吴 郑 孙 赵 钱

王 李 陈 周 吴 郑 孙 赵 钱 孙 李 周 吴 郑 孙 赵 钱

王 李 陈 周 吴 郑 孙 赵 钱 孙 李 周 吴 郑 孙 赵 钱

张

刘

100 and the two

to the 1000. The 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1 1 1

1000

1000

1	1	1	1	1
2	1	1	1	1
3	1	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	1	1
6	1	1	1	1
7	1	1	1	1
8	1	1	1	1
9	1	1	1	1
10	1	1	1	1
11	1	1	1	1
12	1	1	1	1
13	1	1	1	1
14	1	1	1	1
15	1	1	1	1
16	1	1	1	1
17	1	1	1	1
18	1	1	1	1
19	1	1	1	1
20	1	1	1	1
21	1	1	1	1
22	1	1	1	1
23	1	1	1	1
24	1	1	1	1
25	1	1	1	1
26	1	1	1	1
27	1	1	1	1
28	1	1	1	1
29	1	1	1	1
30	1	1	1	1
31	1	1	1	1
32	1	1	1	1
33	1	1	1	1
34	1	1	1	1
35	1	1	1	1
36	1	1	1	1
37	1	1	1	1
38	1	1	1	1
39	1	1	1	1
40	1	1	1	1
41	1	1	1	1
42	1	1	1	1
43	1	1	1	1
44	1	1	1	1
45	1	1	1	1
46	1	1	1	1
47	1	1	1	1
48	1	1	1	1
49	1	1	1	1
50	1	1	1	1
51	1	1	1	1
52	1	1	1	1
53	1	1	1	1
54	1	1	1	1
55	1	1	1	1
56	1	1	1	1
57	1	1	1	1
58	1	1	1	1
59	1	1	1	1
60	1	1	1	1
61	1	1	1	1
62	1	1	1	1
63	1	1	1	1
64	1	1	1	1
65	1	1	1	1
66	1	1	1	1
67	1	1	1	1
68	1	1	1	1
69	1	1	1	1
70	1	1	1	1
71	1	1	1	1
72	1	1	1	1
73	1	1	1	1
74	1	1	1	1
75	1	1	1	1
76	1	1	1	1
77	1	1	1	1
78	1	1	1	1
79	1	1	1	1
80	1	1	1	1
81	1	1	1	1
82	1	1	1	1
83	1	1	1	1
84	1	1	1	1
85	1	1	1	1
86	1	1	1	1
87	1	1	1	1
88	1	1	1	1
89	1	1	1	1
90	1	1	1	1
91	1	1	1	1
92	1	1	1	1
93	1	1	1	1
94	1	1	1	1
95	1	1	1	1
96	1	1	1	1
97	1	1	1	1
98	1	1	1	1
99	1	1	1	1
100	1	1	1	1

Send the list to :

Ms

Mr G. S. Jha

to

Mr. G. S. Jha

Mr

Mr. G. S. Jha

Mr. G. S. Jha

Mr. G. S. Jha

of

Ms

原 係 制 用 水 生

后 即 是 凉 油 凉 凉

后 即 是 凉 油 凉 凉

后 即 是 凉 油 凉 凉

后 即 是 凉 油 凉 凉

1 1 1

后 即 是 凉 油 凉 凉

后 即 是 凉 油 凉 凉

10000

1

1 1 1

1

10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000

Handwritten text on a grid background, appearing to be a list or notes.

Handwritten text on a grid background, appearing to be a list or notes.

Handwritten text on a grid background, appearing to be a list or notes.

Handwritten text on a grid background, appearing to be a list or notes.

Handwritten text on a grid background, appearing to be a list or notes.

Handwritten text on a grid background, appearing to be a list or notes.

1. **Multiple Choice**

1. Which of the following is NOT a characteristic of a good leader?

A. Empathy

2. What is the primary responsibility of a manager?

A. To set a vision

B. To manage resources

3. Which of the following is a key component of emotional intelligence?

A. Self-awareness

B. Empathy

C. Self-regulation

五加皮酒 五加皮酒

五加皮酒 五加皮酒

五加皮酒 五加皮酒

五加皮酒 五加皮酒

五加皮酒 五加皮酒

五加皮酒 五加皮酒

五加皮

五加皮

10000 1 10000 1 10000 1 10000 1

10000 1 10000 1 10000 1 10000 1

10000 1 10000 1 10000 1 10000 1

10000 1 10000 1 10000 1 10000 1

1 1 1 1

10000

10000

昆	昆	昆	昆	昆
昆	昆	昆	昆	昆

昆	昆	昆	昆	昆
昆	昆	昆	昆	昆

昆	昆	昆	昆	昆
昆	昆	昆	昆	昆

昆	昆	昆	昆	昆
昆	昆	昆	昆	昆

昆	昆
昆	昆

昆	昆
昆	昆

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000

1000 1000

1. 100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100%

100%

1 1 5

0 1

1 5 10 10 5 1

1 5 10 10 5 1

1 5 10 10 10 5 5 1

1 5 10 10 10 10 5 5 1

1 5 10 10 10 10 10 5 5 1

1 5 10 10 10 10 10 10 5 5 1

1 5 10

1

1

1000

1000

1. What is the main purpose of the text?

The main purpose of the text is to inform the reader about the benefits of using a VPN.

It explains how a VPN works, the different types of VPNs, and the advantages and disadvantages of using one.

The text also provides information on how to choose a VPN and how to use one.

1. 1. 1. 1.

Answer: 1. 1. 1. 1.

Answer: 1. 1. 1. 1.

to calculate the value of

the integral $\int_0^1 x^2 dx$

1. $x = 0$ 2. $x = 1$

which are the limits

of the interval $[0, 1]$

the value of the integral is

$\frac{1}{3}$

12/15/2019 10:10 AM

12/15/2019

12/15/2019

1991

10

10-21-91

10-21-91

1

1

10-21-91

10-21-91

1

10-21-91

10-21-91

10-21-91

1

1

10-21-91

10-21-91

10-21-91

10-21-91

何

何

何

何陋也

何陋也

何陋

一

何陋也

何陋也

何陋

何

何

何陋也

何陋也

何陋

何陋也

一

何

何

何陋

何

何

何陋

1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1	1	1	1	1
2	1	1	1	1
3	1	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	1	1
6	1	1	1	1
7	1	1	1	1
8	1	1	1	1
9	1	1	1	1
10	1	1	1	1
11	1	1	1	1
12	1	1	1	1
13	1	1	1	1
14	1	1	1	1
15	1	1	1	1
16	1	1	1	1
17	1	1	1	1
18	1	1	1	1
19	1	1	1	1
20	1	1	1	1
21	1	1	1	1
22	1	1	1	1
23	1	1	1	1
24	1	1	1	1
25	1	1	1	1
26	1	1	1	1
27	1	1	1	1
28	1	1	1	1
29	1	1	1	1
30	1	1	1	1
31	1	1	1	1
32	1	1	1	1
33	1	1	1	1
34	1	1	1	1
35	1	1	1	1
36	1	1	1	1
37	1	1	1	1
38	1	1	1	1
39	1	1	1	1
40	1	1	1	1
41	1	1	1	1
42	1	1	1	1
43	1	1	1	1
44	1	1	1	1
45	1	1	1	1
46	1	1	1	1
47	1	1	1	1
48	1	1	1	1
49	1	1	1	1
50	1	1	1	1
51	1	1	1	1
52	1	1	1	1
53	1	1	1	1
54	1	1	1	1
55	1	1	1	1
56	1	1	1	1
57	1	1	1	1
58	1	1	1	1
59	1	1	1	1
60	1	1	1	1
61	1	1	1	1
62	1	1	1	1
63	1	1	1	1
64	1	1	1	1
65	1	1	1	1
66	1	1	1	1
67	1	1	1	1
68	1	1	1	1
69	1	1	1	1
70	1	1	1	1
71	1	1	1	1
72	1	1	1	1
73	1	1	1	1
74	1	1	1	1
75	1	1	1	1
76	1	1	1	1
77	1	1	1	1
78	1	1	1	1
79	1	1	1	1
80	1	1	1	1
81	1	1	1	1
82	1	1	1	1
83	1	1	1	1
84	1	1	1	1
85	1	1	1	1
86	1	1	1	1
87	1	1	1	1
88	1	1	1	1
89	1	1	1	1
90	1	1	1	1
91	1	1	1	1
92	1	1	1	1
93	1	1	1	1
94	1	1	1	1
95	1	1	1	1
96	1	1	1	1
97	1	1	1	1
98	1	1	1	1
99	1	1	1	1
100	1	1	1	1

1991

1991

1991

1991

1991

1991

1991

1991

1991

1991

1991

1991

1991

1991

1991

1991

1991

on

on

on

on

on
on

on
on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

He is now in the
the

the

the

the

the

the

the

the

the

the

on the 1st of

October 1861

1861

October 1861

1861

1861

1861

1861

1861

1861

Will probably be used by all levels
to study the book and to
prepare for the exam

Feedback after the exam will be
used to improve the book

It will be a good idea to
use the book as a guide to
the exam

Don't forget to read the
introduction to the book

1. Introduction to the book
2. The book

3. The book
4. The book

5. The book
6. The book

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Er wird nie

Er wird nie sein
Er wird nie sein
Er wird nie sein

Er wird nie sein
Er wird nie sein
Er wird nie sein

Er wird nie sein
Er wird nie sein
Er wird nie sein

Er wird nie sein
Er wird nie sein
Er wird nie sein

Er wird nie sein
Er wird nie sein
Er wird nie sein

Er wird nie sein
Er wird nie sein
Er wird nie sein

Er wird nie sein
Er wird nie sein
Er wird nie sein

सुत

अथ

अथैवमिदं

अथैवमिदं

१

१

अथैवमिदं

अथैवमिदं

अथैवमिदं

अथैवमिदं

अथैवमिदं

१

१

अथैवमिदं

अथैवमिदं

N	b	a	r
---	---	---	---

schubst ein	schubst ein	schubst ein	schubst ein
-------------	-------------	-------------	-------------

--	--	--	--

schubst ein	schubst ein	schubst ein	schubst ein
-------------	-------------	-------------	-------------

1	1	1	1
---	---	---	---

schubst ein	schubst ein	schubst ein	schubst ein
-------------	-------------	-------------	-------------

schubst ein	schubst ein	schubst ein	schubst ein
-------------	-------------	-------------	-------------

1	1	1	1
---	---	---	---

schubst ein	schubst ein	schubst ein	schubst ein
-------------	-------------	-------------	-------------

schubst ein	schubst ein	schubst ein	schubst ein
-------------	-------------	-------------	-------------

U S N I N

U S S I S T R I E T I O N

U S S I S T R I E T I O N

U S S I S T R I E T I O N

U S S I S T R I E T I O N

U S S I S T R I E T I O N

U S S I S T R I E T I O N

U S

U S

on on

on on

is is

is

is

is

is

2020 2021 2022 2023

2024 2025 2026 2027

2028 2029 2030 2031

2032 2033 2034 2035

2036 2037 2038 2039

2040

2041

ei

ui

肥 肥 肥 肥 肥

肥 肥 肥 肥 肥

i

i

肥 肥 肥 肥 肥

肥 肥 肥 肥 肥

e

ei

肥 肥 肥 肥 肥

肥 肥 肥 肥 肥

肥 肥 肥 肥 肥

肥 肥 肥 肥 肥

肥 肥 肥

肥 肥 肥

肥

肥

肥

肥

191

של ימי יום

1 1

היום יום יום

של

של יום יום

היום יום יום

1 1

היום יום

היום יום

one

1

two two two two

1 1 1 1

three three three three

four four

five five five five

six six six six six six

1 1 1 1 1

seven seven

eight eight

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Handwritten text on a ruled line.

雙龍橋

雙龍橋

雙龍橋

雙龍橋

111

111

111

Handwritten text on the top line of the first row.

Handwritten text on the bottom line of the first row.

Handwritten text on the top line of the second row.

Handwritten text on the bottom line of the second row.

Handwritten text on the top line of the third row.

Handwritten text on the bottom line of the third row.

Handwritten text on the top line of the fourth row.

Handwritten text on the top line of the fifth row.

Handwritten text on the bottom line of the fifth row.

Handwritten text on the top line of the sixth row.

Handwritten text on the bottom line of the sixth row.

Handwritten text on the top line of the seventh row.

Handwritten text on the bottom line of the seventh row.

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जाति

५१

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जाति

५१

५१

1999-2000

1999-2000

1999-2000

1999-2000

1999-2000

1999-2000

1999-2000

